

**ANALISIS PERSEPSI LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI
KEUANGAN MASYARAKAT DESA PESISIR DI
KECAMATAN BRANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Alfira Israfia
NPM : 1805180007
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Srata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama Lengkap : ALFIRA ISRAFIA
NPM : 1805180007
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Konsentrasi : RISET EKONOMI DAN BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS PERSEPSI LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT DESA PESISIR DI KECAMATAN BRANDAN BARAT

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

Penguji I

Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si

Penguji II

ERİYANTI NASUTION, S.E., M.Ec

Pembimbing

Dra. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ALFIRA ISRAFIA

NPM : 1805180007

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Konsentrasi : RISET EKONOMI DAN BISNIS

Judul Skripsi : ANALISIS PERSEPSI LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI
KEUANGAN MASYARAKAT DESA PESISIR DI KECAMATAN
BRANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 02 September 2022

Pembimbing Skripsi

(Dra. LAILAN SAFINA HSB, MSi)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. Prawidya Hartani RS S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6624567, Kode Pos Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA MAHASISWA : ALFIRA ISRAFIA
NPM : 1805180007
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
KONSENTRASI : RISET EKONOMI DAN BISNIS
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS PERSEPSI LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT DESA PESISIR DI KECAMATAN BRANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
11/04-2022	Bab I Rapiakan cover, Revisi judul menambahkan materi di latar belakang		
18/04-2022	Revisi: tambahan latar Belakang, menambah data, merapikan identifikasi masalah, rumusan masalah & Tujuan penelitian.		
22/04-2022	Bab I penambahan pembuangan latar Belakang dan penyusunan struktur Bab II		
18/05-2022	Bab II Penyesuaian grand teori Haru menggambar text book, penambahan faktor dan indikator pada kerangka Model analisa faktor		
24/05-2022	Bab III penambahan populasi dan sampel sesuai dengan penelitian. menguraikan metode Analisa faktor Dan melengkapi bagian daftar isi, Daftar pustaka.		
30/05-2022	ACC proposal untuk di seminar kan		

Medan,2022

Pembimbing

Dra. LAILAN SAFINA Hsb, M.Si

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Ekonomi
Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFIRA ISRAFIA
Npm : 1805180007
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset Ekonomi Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Persepsi Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Masyarakat Desa Pesisir Di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, September 2022
yang menyatakan



ALFIRA ISRAFIA

ABSTRAK

ALFIRA ISRAFIA (1805180007)

“Analisis Persepsi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Masyarakat Desa Pesisir Di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat”

Perkembangan literasi dan inklusi keuangan Indonesia secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, artinya terdapat peningkatan terhadap masyarakat yang well literate, yaitu kondisi dimana seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, serta memiliki keterampilan dan perilaku yang benar dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Namun disamping itu untuk wilayah pedesaan aksesibilitas lembaga keuangan belum merata, karena disebabkan oleh beberapa faktor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan faktor apa saja yang mempengaruhi literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat desa pesisir di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Non-probability sampling dan di peroleh sampel sebanyak 35 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari hasil penyebaran angket (kuesioner) dan data skunder yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode analisa faktor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor informasi berpengaruh dan signifikan terhadap aksesibilitas lembaga keuangan di desa pesisir Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Faktor Pendapatan dan Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Aksesibilitas Lembaga Keuangan. Perkembangan Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan per tiga tahun nya, hanya saja tetap diperlukan cara yang lebih menarik agar menambah minat masyarakat terhadap Literasi maupun Inklusi Keuangan.

Kata Kunci: *Perkembangan Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Aksesibilitas Lembaga Keuangan.*

ABSTRACT

ALFIRA ISRAFIA (1805180007)

“Analisis Persepsi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Masyarakat Desa Pesisir Di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat”

The development of Indonesia's financial literacy and inclusion has generally increased from year to year, meaning that there is an increase in a wellliterate society, which is a condition where a person has knowledge and confidence about financial institutions, including features, benefits and risks, and has the right skills and behavior in using financial products and services. But in addition, for rural areas, the accessibility of financial institutions has not been evenly distributed, because it is caused by several factors.

This study aims to analyze what perceptions and factors affect the financial literacy and financial inclusion of coastal village communities in West Brandan District, Langkat Regency. The sampling technique used the Non-probability sampling method and obtained a sample of 35 respondents. The type of data used is primary data sourced from the results of the distribution of questionnaires (questionnaires) and skunder data sourced from the Financial Services Authority. This study used a factor analysis method.

The results showed that information factors influenced and significantly affected the accessibility of financial institutions in coastal villages of West Brandan District, Langkat Regency. Income and Education Factors have no effect on the Accessibility of Financial Institutions. The development of Financial Literacy and Inclusion in Indonesia continues to experience a significant increase every three years, it's just that a more attractive way is still needed to increase public interest in Financial Literacy and Inclusion.

Keywords: *Development of Financial Literacy, Financial Inclusion, and Accessibility of Financial Institutions.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahillobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan proposal yang berjudul “**Analisis Persepsi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Masyarakat Desa Pesisir Di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat**”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan Proposal ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Ibu saya Zairani Nasution yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu menjadi perempuan hebat dan kuat selama hidup saya, yang memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menghadapi segala proses yang saya jalani dan membuat saya kuat dalam menghadapi segala situasi.
2. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

4. Ibu Dr Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dra. Lailan Safina Hasibuan M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi masukan kepada saya dengan penuh kesabaran membimbing saya.
7. Seluruh Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
8. Bapak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik .
9. Kepada seluruh saudara persepupuan saya (kak eby, finy, bang farid, bang dedek) yang selalu memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan proposal ini
10. Kepada kakak sekaligus teman saya (kak farah, kak meisy, nuh aulya) yang sangat amat dekat dengan saya tidak pernah berhenti membantu dan menghibur saya selama mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan saya (Fildzah, Salsa, Fariz, Dara, Lila) serta rekan sekelas masa perkuliahan, dan teman-teman dekat saya yang telah memberi informasi mengenai perkuliahan, dan memberi semangat kepada saya.

12. Kepada seluruh keluarga besar Ekonomi Pembangunan UMSU dari angkatan 2018-2022.
13. Kepada Nanda Ardiansyah yang telah membantu dan memberi semangat kepada saya, hingga menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan. Maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih , Wassamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, September 2022

Penulis

Alfira Israfia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	25
1.3 Batasan Masalah.....	26
1.4 Rumusan Masalah	26
1.5 Tujuan Penelitian.....	26
1.6 Manfaat Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1 Landasan Teori	28
2.1.1 Uang dan Lembaga Keuangan.....	28
A. Definisi Uang.....	28
B. Fungsi Uang	29
C. Jenis Uang.....	30
2.1.2 Lembaga Keuangan	32
A. Bank.....	32
B. Bukan Perbankan	36
2.1.3 Permintaan Uang (<i>Money Demand</i>)	38
A. Teori Permintaan Uang Klasik	39
B. Teori Permintaan Uang Keynes	41
C. Teori Portofolio Permintaan Uang.....	42
2.1.4 Teori Perilaku Konsumen	44
A. Kurva Indiferensi	46
B. Tingkat Substitusi Marginal.....	46
C. Pendekatan Ordinal dan Kardinal	47
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen	48
2.2 Penelitian Terdahulu	50
2.3 Regulasi/Kebijakan	53
2.4 Kerangka Konseptual	57
2.4.1 Kerangka Konseptual Penelitian	57
2.4.2 Kerangka Konseptual Model Analisa Faktor	58
2.5 Hipotesis.....	59

BAB III METODE PENELITIAN.....	60
3.1 Jenis Penelitian	60
3.2 Definisi Oprasional.....	60
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	62
3.3.1 Tempat Penelitian	62
3.3.2 Waktu Penelitian.....	62
3.4 Jenis dan Sumber Data	62
3.4.1 Jenis Data.....	62
3.4.2 Sumber Data	63
3.5 Populasi dan Sampel	63
3.5.1 Populasi	63
3.5.2 Sampel	63
3.6 Teknik Pengumpulan Data	64
3.7 Teknik Analisis Tujuan Penelitian	65
3.7.1 Analisis Deskriptif	65
3.7.2 Model Analisa Faktor	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	70
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Langkat.....	70
4.1.1 Kondisi Geografi	70
4.1.2 Kondisi Pemerintah	72
4.1.3 Kondisi Demografi	73
4.1.4 Kondisi Sosial.....	75
4.1.5 Kondisi Ekonomi.....	79
4.2 Perkembangan Literasi Dan Inklusi Keuangan	82
4.2.1 Perkembangan Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia.....	82
4.2.2 Perkembangan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sumatera Utara	90
4.3 Analisa Faktor	91
4.3.1 Analisa faktor dan analisis persepsi masyarakat terhadap aksesibilitas lembaga keuangan, dan literasi keuangan di wilayah pesisir Kabupaten Langkat.....	91
4.3.2 Hasil Penelitian Analisis SEM-PLS	95
BAB V PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks inklusi keuangan berdasarkan Provinsi di Indonesia.....	20
Tabel 1.2 Kepadatan penduduk menurut kecamatan	22
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	52
Tabel 3.1 Definisi Oprasional	60
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Langkat.....	72
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,2020	73
Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Kabupaten Langkat(jiwa) 2021	74
Tabel 4.4 APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Langkat Tahun 2022	75
Tabel 4.5 Statistik Tenaga Kesehatan Kabupaten Langkat.....	76
Tabel 4.6 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Langkat (km) 2019- 2021	77
Tabel 4.7 Persentase Penduduk Miskin	78
Tabel 4.8 Jumlah Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Langkat.....	79
Tabel 4.9 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia 2016-2022.....	83
Tabel 4.10 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia Berdasarkan Gender	84
Tabel 4.11 Persentase Literasi dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	85
Tabel 4.12 Perestase Literasi dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Tingkat Usia.....	86
Tabel 4.13 Persentase Literasi dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	87
Tabel 4.14 Persentase Literasi dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Sektor Jasa Keuangan	87
Tabel 4.15 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia per Provinsi.....	88
Tabel 4.16 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Sumatera Utara 2016-2022	90
Tabel 4.17 Karakteristik Responden	91
Tabel 4.18 <i>Convergent Validity Aksesibilitas Lembaga Keuangan</i>	96
Tabel 4.19 <i>Convergent Validity Pada Pendapatan</i>	96
Tabel 4.20 <i>Convergent Validity Pada Pendidikan</i>	97

Tabel 4.21 <i>Convergent Validity Pada Informasi</i>	98
Tabel 4.22 <i>Convergent Validity Aksesibilitas Lembaga Keuangan</i>	100
Tabel 4.23 <i>Convergent Validity Pada Pendapatan</i>	100
Tabel 4.24 <i>Convergent Validity Pada Pendidikan</i>	101
Tabel 4.25 <i>Convergent Validity Pada Informasi</i>	102
Tabel 4.26 <i>Discriminante Validity Pada Avarage Extracted (AVE)</i>	103
Tabel 4.27 <i>Composite Reability</i>	104
Tabel 4.28 <i>R- Square</i>	104
Tabel 4.29 Uji Hipotesis	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase literasi dan inklusi keuangan responden tahun 2019.....	4
Gambar 1.2 Indeks literasi keuangan	7
Gambar 1.3 Persentase literasi keuangan responden berdasarkan sektor jasa keuangan.....	10
Gambar 1.4 Indeks inklusi keuangan	14
Gambar 1.5 Persentase inklusi keuangan responden berdasarkan sektor jasa keuangan.....	16
Gambar 1.6 Program keuangan inklusif Bank Indonesia.....	17
Gambar 2.1 Kurva indiferensi.....	46
Gambar 2.2 Karakteristik kurva indiferen.....	47
Gambar 2.3 Kerangka konseptual	57
Gambar 2.4 Bagan kerangka model analisa faktor	58
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Langkat	71
Gambar 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten langkat 2020-2021	78
Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat dan PDRB Sumatera Utara 2017-2021 (%).....	81
Gambar 4.4 PDRB per Kapita Kabupaten Langkat ADHB dan ADHK 2017-2021 (ribu rupiah).....	82
Gambar 4.5 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Strata Wilayah 2016-2019.....	85
Gambar 4.6 Jenis Kelamin	92
Gambar 4.7 Pendidikan Terakhir	93
Gambar 4.8 Tingkat Usia	93
Gambar 4.9 Jenis Pekerjaan	94
Gambar 4.10 Rata-rata Pendapatan.....	94
Gambar 4.11 <i>First Outer Loading</i>	98
Gambar 4.12 <i>Second Outer Loading</i>	99
Gambar 4.13 Mengetahui atau Tidak Terhadap Produk/Jasa Keuangan	107
Gambar 4.14 Jenis Produk/Jenis Yang Diketahui.....	107
Gambar 4.15 Mengetahui atau Tidak Produk/Jasa Lembaga Keuangan	108

Gambar 4.16 Produk Keuangan Yang Diketahui.....	109
Gambar 4.17 Menggunakan atau Tidak Produk/Jasa Lembaga Keuangan.....	109
Gambar 4.18 Produk/Jasa Seperti Apa yang Digunakan	110
Gambar 4.19 Lembaga Yang Sering Digunakan	111
Gambar 4.20 Lembaga Layanan Non Perbankan Yang sering Digunakan.....	111
Gambar 4.21 Produk Layanan Jasa Perbankan/ Non Perbankan Yang Sering Digunakan.....	112
Gambar 4.22 Mengetahui atau Tidak Tentang Keuangan Digital	113
Gambar 4.23 Produk Layanan Keuangan Digital Yang Diketahui.....	113
Gambar 4.24 Jenis Keuangan Digital Yang Digunakan	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang Indonesia terus berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya, salah satunya dengan melalui pembangunan bidang ekonomi. Secara umum tujuan negara dalam ekonomi makro adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi yang baik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan yang menurun serta pengangguran yang sedikit. Pemerintah dalam rangka mencapai kondisi tersebut telah mendesain kebijakan-kebijakan baik itu dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pembangunan yang sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu wujud dari pengembangan agar negara kita dapat berkembang dan dapat bersaing dengan negara lain serta 5 mewujudkan amanah UUD 1945 di alinea ke-4 yaitu: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan yang sedang giat dilakukan oleh pemerintah memberikan pengaruh terhadap sumber daya yang ada disekitarnya sehingga pengaruh tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan perekonomian suatu negara akan dipengaruhi beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun faktor yang berasal dari luar negeri. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian tersebut adalah perkembangan keuangan. Ketika keuangan suatu negara

berkembang maka akan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian. Dalam hal pengembangan jasa keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan OJK mempunyai peran penting terhadap pelaksanaan dan pengawasan regulasi sektor keuangan di Indonesia. Bahkan ketiga institusi tersebut telah memiliki suatu suara terkait dengan sinergi peran jasa keuangan dan pengentasan kemiskinan. Perluasan penggunaan jasa keuangan diyakini berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Dengan meningkatnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat terhadap jasa keuangan maka tingkat kemiskinan akan menurun dan peningkatan keuangan akan terjadi, pada akhirnya akan bermuara pada perkembangan perekonomian suatu daerah/negara.

Masyarakat pada umumnya tidak asing dengan kata tabungan, yang merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya. Tabungan digunakan masyarakat untuk berjaga-jaga apabila menghadapi ketidak pastian ekonomi dimasa yang akan datang. Tabungan memiliki dua kegiatan yang dilakukan, yang pertama untuk konsumsi kehidupan sehari-hari dan kebutuhan masyarakat, sedangkan yang kedua untuk saving. Sehingga kehidupan masa depan akan lebih nyaman untuk memenuhi kebutuhan, Atau bisa dijadikan sebagai salah satu rencana pensiun. Untuk menggunakan uang kita memerlukan motivasi dan aksesibilitas, karena pendapatan setiap individu belum tentu sama persis dengan yang di konsumsi setiap individu. aksesibilitas yang dimaksud ialah sebuah fasilitas yang di sediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan individu dalam mempermudah suatu proses.

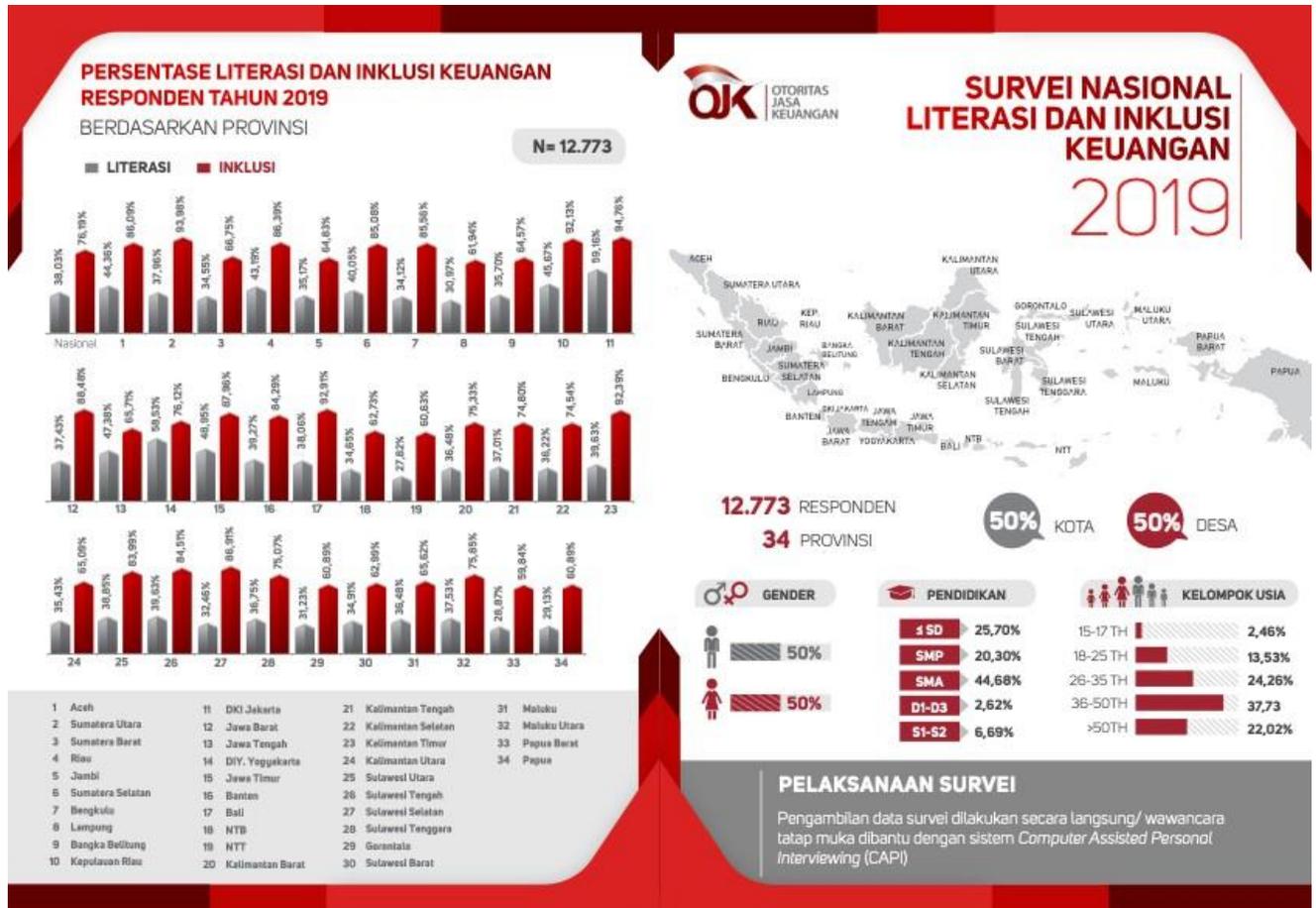
Tabungan memiliki dampak positif pada perekonomian secara keseluruhan karena dana yang ditempatkan dalam aset keuangan kemudian disalurkan melalui

perantara keuangan untuk mendanai investasi oleh perusahaan. Salah satu cara untuk meningkatkan tabungan nasional adalah dengan mendorong seseorang untuk meningkatkan tabungan pribadi. Ini dapat dicapai dengan menerapkan program pendidikan keuangan untuk meningkatkan pengetahuan keuangan individu, yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang keadaan keuangan sendiri, memungkinkan untuk membuat rencana keuangan untuk masa depan dan memilih instrumen keuangan yang paling tepat yang akan membantu dalam mencapai tujuan keuangan. Banyak literatur pengetahuan tentang keuangan telah diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir.

Masih sedikit masyarakat Indonesia yang gemar menabung. Hal ini salah satunya adalah karena budaya masyarakat Indonesia yang konsumtif. Budaya konsumtif ini tentu saja akan berpengaruh terhadap tabungan masyarakat, karena tabungan merupakan pendapatan yang dikurangi konsumsi. Artinya, semakin besar konsumsi masyarakat, maka akan semakin sedikit tabungan masyarakat tersebut, bahkan jika konsumsinya terlalu besar hingga melebihi pendapatannya maka tabunganya bisa sama dengan nol atau tidak memiliki simpanan sama sekali. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat tersebut.

Salah satu kesenjangan utama dalam minat dan perilaku menabung adalah literasi keuangan. Literasi keuangan berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya. Untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan, maka perlu adanya pengetahuan tentang aktivitas perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan penggunaan keuangan. Literasi keuangan juga menunjukkan sikap atau perilaku seseorang didalam mengelola aktivitas keuangannya. Salah satu kesulitan keuangan yang muncul adalah ketidak

pahaman literasi keuangan individu, sehingga sering terjadi kesalahan dalam mengelola keuangan pribadi.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Gambar 1.1 Persentase literasi dan inklusi keuangan responden tahun 2019

Survei SNLIK OJK 2019 ini mencakup 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan gender dan strata wilayah perkotaan/perdesaan. Berdasarkan data survei yang di publikasikan oleh OJK diatas, maka dapat dilihat bahwa literasi keuangan di 34 Provinsi masih tergolong sangat rendah. Secara nasional, kemampuan literasi keuangan masyarakat indonesia berada di angka 38,03%.

Pada SNLIK tahun 2019, pengukuran indeks literasi keuangan dilakukan berdasarkan strata wilayah perdesaan dan perkotaan. Di setiap provinsi dipilih masing-masing 1 (satu) kota untuk merepresentasikan perkotaan dan 1 (satu) kabupaten untuk merepresentasikan wilayah perdesaan (kecuali provinsi DKI Jakarta). Hasilnya, indeks literasi keuangan berdasarkan strata wilayah perdesaan dan perkotaan mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke 2019, namun indeks literasi keuangan perdesaan tahun 2019 berada di bawah indeks literasi nasional (38,03%).

Persentase literasi keuangan berdasarkan klasifikasi usia pada SNLIK tahun 2019 menunjukkan pola yang sama dengan SNLIK tahun 2016, dimana kelompok usia 26 – 35 tahun memiliki persentase literasi keuangan tertinggi dari kelompok usia lainnya, diikuti dengan kelompok usia 18 – 25 tahun, 36 – 50 tahun, dan di atas 50 tahun. Kelompok usia 15 – 17 tahun memiliki persentase literasi keuangan paling rendah pada SNLIK tahun 2016 dan SNLIK tahun 2019.

Kemampuan literasi keuangan tertinggi sendiri diperoleh oleh masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 59,16%. Disusul oleh wilayah DI Yogyakarta dengan 58,53%. Sedangkan, di urutan ketiga ada Jawa Timur dengan 48,95%.

Di tengah perkembangan era ekonomi global saat ini setiap orang harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Karena dari pengelolaan keuangan tersebut akan menghasilkan keputusan dalam penggunaan ataupun alokasi dana yang dimiliki. Agar keuangan dapat digunakan secara cermat dan efisien, maka penting bagi individu untuk paham tentang literasi keuangan. Ilmu keuangan terus

berubah dengan cepat, sebagai kemajuan terjadi tidak hanya dalam hal teori keuangan, tetapi dalam prakteknya di dunia nyata, termasuk didalam keuangan pribadi. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman ini sangat diperlukan setiap orang supaya dapat secara optimal menggunakan instrumen-instrumen serta produk-produk finansial yang ada serta dapat membuat keputusan keuangan yang tepat. Saat ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan masih relatif rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan. Hal ini berpengaruh pada rendahnya pemanfaatan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan.

Tidak hanya itu, indonesia juga tertinggal dalam hal Literasi keuangan dengan hanya mencakup 32% dari total penduduk, sedangkan malaysia dan singapura masing-masing mencapai 36% dan 59% disusul dengan Thailand 27%, Filipina 25%, Vietnam 24% dan cambodia 18%. (*World Bank*, 2017). *Organisation for Economic Co-operation and Development OECD* (2016) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Remund (2010) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan pengukuran terhadap pemahaman seseorang mengenai konsep keuangan, dan memiliki kemampuan dan keyakinan untuk mengatur keuangan pribadi melalui pengambilan keputusan jangka pendek yang tepat, perencanaan keuangan jangka panjang serta memperhatikan kejadian dan kondisi ekonomi. Huston (2010)

mengatakan literasi keuangan meliputi kesadaran dan pengetahuan akan instrumen keuangan dan aplikasinya di dalam bisnis dan perhitungan.

Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang tersebut kemudian berkembang menjadi keterampilan keuangan, dimana keterampilan keuangan itu sendiri didefinisikan sebagai kemampuan dalam menerapkan pengetahuan keuangan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari (Palameta et.al, 2016). Keterampilan keuangan memungkinkan seseorang untuk dapat dapat mengambil keputusan yang rasional dan efektif terkait dengan keuangan dan sumber ekonominya (Kunihara, 2013).



Sumber : Otoritas jasa keuangan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019

Gambar 1.2 Indeks Literasi Keuangan

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK,2019), literasi keuangan di Indonesia berada di indeks 38,03%. Meningkat hampir 10% dari tiga tahun sebelumnya, yakni 29,7% di tahun 2016. Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia di tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 38,03% yang berarti dari setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 38 orang yang well literate. Adanya perkembangan dari literasi keuangan yang telah diupayakan oleh pemerintah.

Tingkat literasi keuangan sendiri juga memiliki tingkatan-tingkatan tertentu, berdasarkan level pemahaman yang dimiliki masyarakat. Hal tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan.

Tujuan Pemerintah melalui OJK saat ini adalah menjadikan masyarakat Indonesia *well literate* yaitu memiliki pengetahuan yang cukup tentang lembaga keuangan dan layanannya. Karena sebelum menggunakan layanan jasa lembaga keuangan masyarakat harus mengetahui lebih dahulu apa itu Lembaga Keuangan dan Produk-produknya (Literasi keuangan) agar mempermudah masyarakat dalam mengelola keuangan pribadinya. Selain itu, menurut studi yang dilakukan oleh World Bank (2014) menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara literasi keuangan dengan perluasan akses keuangan. Sama halnya dengan studi yang dilakukan oleh OECD (2013) yang menyatakan bahwa mengkombinasikan edukasi keuangan dengan ketersediaan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi terjadi pada hampir seluruh bidang bisnis salah satunya pada sektor jasa keuangan. Hal tersebut tidak terlepas dari meningkatnya penggunaan internet terus mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada kuartal II tahun 2020, penetrasi penggunaan internet di Indonesia mencapai 73,7% atau terdapat sekitar 196,71 juta pengguna.

Jumlah tersebut naik dari tahun 2018 yang hanya mencapai 64,8% atau terdapat sekitar 171,17 juta pengguna, artinya, terdapat peningkatan penetrasi penggunaan internet sebesar 8,9% atau terdapat sekitar 25,5 juta pengguna.

Layanan keuangan digital adalah layanan keuangan yang mengandalkan teknologi digital untuk penyampaian dan penggunaannya oleh konsumen. Keuangan digital mencakup semua produk, layanan, teknologi dan infrastruktur yang memungkinkan individu atau perusahaan memiliki akses ke pembayaran, tabungan, dan fasilitas kredit secara daring tanpa perlu mengunjungi cabang bank atau tanpa berurusan langsung dengan penyedia layanan keuangan. Perkembangan layanan keuangan digital tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi finansial (fintech). Fintech mengacu pada teknologi digital yang memiliki potensi untuk mengubah penyediaan layanan keuangan yang mendorong pengembangan model bisnis, aplikasi, proses, dan produk baru atau yang sudah ada.

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

- Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*;
- Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Otoritas jasa keuangan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019

Gambar 1.3 Persentase Literasi Keuangan Responden Berdasarkan Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan gambar diatas dapat kita ketahui adanya peningkatan dari setiap sektor jasa keuangan per tiga tahun terakhir, tetapi hanya sektor perbankan yang mengalami peningkatan hampir 10%, untuk sektor perasuransian dan dana pensiun meningkat hanya sebesar 4%, sedangkan untuk pasar modal , lembaga pembiayaan, pegadaian dan lembaga keuangan mikro mengalami peningkatan yang hanya berkisaran 0,85% sampai 2%. yang berarti pemerintah harus kembali meningkatkan literasi keuangan tersebut kepada masyarakat, agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan lembaga yang ilegal.

Literasi keuangan mencakup kemampuan untuk membedakan pilihan keuangan, membahas keuangan dan masalah keuangan tanpa ketidaknyamanan, merencanakan masa depan, termasuk peristiwa ekonomi secara umum. Literasi keuangan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara.

Upaya dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan melalui pelaksanaan Edukasi Keuangan yang diawali dengan pengenalan mendasar terhadap Lembaga Jasa Keuangan, dan karakteristik, manfaat, biaya, dan risiko suatu produk dan layanan jasa keuangan serta pengelolaan keuangan pribadi yang pada akhirnya diharapkan membawa perubahan positif pada perilaku keuangan masyarakat. Edukasi Keuangan dimaksud perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip terencana dan terukur, berorientasi pada pencapaian, berkelanjutan, dan kolaborasi.

Lebih lanjut lagi peningkatan Literasi Keuangan masyarakat akan mengarahkan masyarakat untuk lebih memahami kebijakan sosial dan ekonomi serta paham terhadap hak dan kewajiban sebagai Konsumen. Dengan pemahaman yang baik serta kesadaran mengenai pentingnya lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, masyarakat dapat memilih serta memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Dengan demikian tampak bahwa peningkatan Literasi Keuangan juga perlu diimbangi dengan peningkatan Inklusi Keuangan yang diwujudkan melalui (1) ketersediaan akses masyarakat terhadap Lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan; serta (2) ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat. Ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan dimaksud, dapat diperoleh

melalui penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah. Produk dan layanan jasa keuangan formal yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut perlu memiliki kualitas yang dalam operasionalnya dapat dilakukan secara terukur, terjangkau, dan tepat sasaran. Di samping itu, juga perlu memperhatikan keberlangsungan penyediaan akses dimaksud.

Literasi Keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan Sedangkan inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut perlu memperhatikan aspek perlindungan konsumen yang secara tidak langsung memiliki peranan penting dalam stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketiga hal dimaksud sebagai suatu trilogi pemberdayaan Konsumen memiliki hubungan yang erat dalam mencapai *financial well-being*. Financial wellbeing merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk bertahan ketika terjadi krisis keuangan.

Hal ini selaras dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang dicanangkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, dimana dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif secara khusus terdapat pilar mengenai Edukasi Keuangan, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, serta perlindungan konsumen.

Dalam upaya peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan ini, OJK perlu bersinergi dengan berbagai pihak, diantaranya dengan PUJK yang memiliki produk dan layanan jasa keuangan serta berinteraksi langsung dengan Konsumen dan/atau masyarakat. Sinergi tersebut dirasakan perlu untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam meningkatkan pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan, produk dan/atau layanan jasa keuangan, memiliki keterampilan dalam menilai manfaat, biaya dan risiko suatu produk dan/atau layanan jasa keuangan, serta memiliki keyakinan terhadap lembaga maupun produk dan/atau layanan jasa keuangan. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang indeks inklusi keuangannya mencapai 98%, Malaysia 85%, Thailand 82% dan Indonesia menempati urutan keempat dengan 49%, dibawahnya ada Filipina dengan 34% Vietnam 31% dan terakhir Cambodia 22%. Berkaca pada negara-negara tetangga seharusnya tingkat literasi dan inklusi keuangan bisa lebih ditingkatkan dengan berbagai dukungan dari berbagai lembaga keuangan. Dengan meningkatnya inklusi keuangan dan literasi perbankan Indonesia diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Otoritas jasa keuangan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019

Gambar 1.4 Indeks Inklusi Keuangan

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2019), inklusi keuangan di Indonesia berada di indeks 76,19%. Meningkat hampir 10% dari tiga tahun sebelumnya, yakni 67,8% di tahun 2016 yang berarti dari setiap 100 penduduk hanya ada 22 orang yang termasuk kategori *well literate*. Melihat data yang ada, masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya memiliki pengetahuan mengenai bagaimana mengoptimalkan uang dengan baik. Disamping itu juga masyarakat belum memahami dengan baik mengenai berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal.

Dalam perkembangannya, upaya dalam peningkatan inklusi keuangan tidak hanya sebatas pengembangan produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga meliputi empat elemen inklusi keuangan lainnya yaitu; perluasan akses keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan produk layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas baik kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi industri keuangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dalam berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Dalam melindungi kepentingan terdapat aspek literasi dan inklusi keuangan yang memerlukan strategi tersendiri dalam implementasinya.

Samma (2009) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses yang memastikan kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal oleh masyarakat sebagai anggota ekonomi. *Consulative Group to Assist the Poor* (CGAP,2016) menjelaskan inklusi keuangan sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan tersebut harus tersedia secara berkelanjutan dan teregulasi dengan baik. *World Bank* (2016) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Sementara itu, kualitas juga dapat diartikan sebagai pilihan yang tersedia bagi konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Hasil survei nasional inklusi keuangan Indonesia yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.



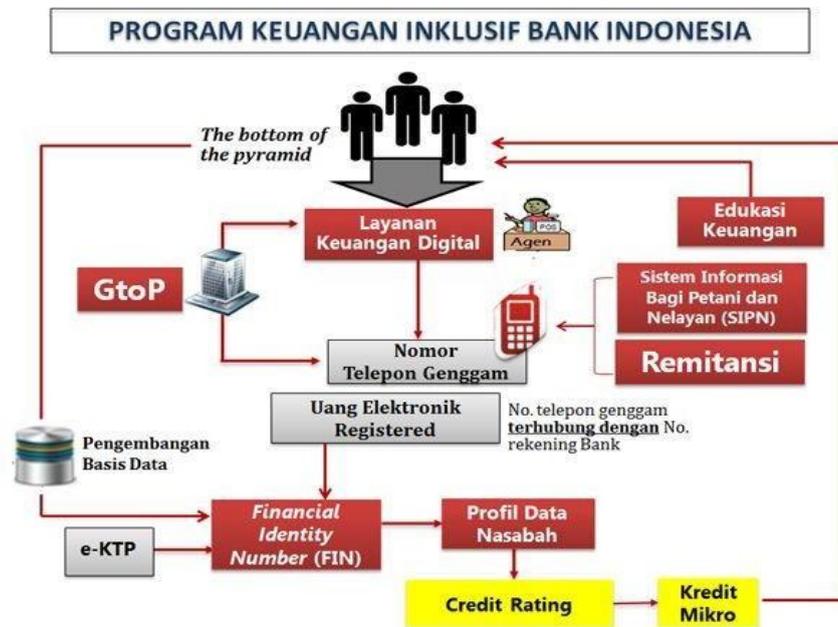
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019

Gambar 1.5 Persentase Inklusi Keuangan Responden Berdasarkan Sektor Jasa Keuangan

Dalam peningkatan inklusifitas keuangan di Indonesia beragam kegiatan edukasi dan program inklusi keuangan secara berkelanjutan dilaksanakan oleh OJK bersama industri jasa keuangan. Edukasi keuangan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti edukasi komunitas, training of trainer, outreach program, kuliah umum, edukasi bahari, iklan layanan masyarakat, edu expo, bioskop keliling, wayangan dan siMOLEK dengan target edukasi yaitu perempuan/ ibu rumah tangga, UMKM, petani/nelayan, TKI/CTKI, pelajar/mahasiswa, professional, karyawan dan pensiunan.

Sedangkan, pelaksanaan program inklusi keuangan dilaksanakan program perluasan akses keuangan, seperti Laku Pandai, Jaring dan Laku Mikro, maupun melalui pengembangan produk mikro, seperti tabungan SimPel, asuransi mikro, reksadana mikro yuk nabung saham dan nabung emas. Salah satu program inklusi keuangan yang sedang digalakkan di era millennial ini adalah digitalisasi keuangan

menggunakan aplikasi dari smartphone, dan agen-agen perbankan di pedesaan yang tidak terjangkau dengan cabang perbankan nasional. Inklusi keuangan menurut OJK adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila sektor swasta dan pemerintah melakukan transaksi keuangan secara digital (bukan tunai), mereka dapat berperan penting dalam mendorong peningkatan kepemilikan rekening secara cepat dan meningkatkan inklusi keuangan.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 1.6 Program Keuangan Inklusif Bank Indonesia

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif menjadi trend paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat

pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Melihat dari keadaan yang ada, pemerintah mengeluarkan kebijakan Financial Inclusion. Adapun yang dimaksud dengan Financial Inclusion atau Keuangan Inklusif menurut Bank Indonesia adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (financial service deepening) yang ditujukan kepada masyarakat in the bottom of the pyramid untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi.

Masyarakat memiliki hambatan dalam mengakses lembaga keuangan. Tingginya unbankable people disebabkan karena gap kemiskinan antar provinsi, rendahnya pembiayaan UMKM, suku bunga kredit mikro tinggi, asymmetric information, kemampuan manajemen UMKM kurang memadai, monopoli bank pada sektor mikro, dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan. Inilah yang menjadi alasan urgennya pengimplementasian financial inclusion. Inklusi keuangan dan literasi keuangan sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha termasuk oleh UMKM, tujuannya adalah agar UMKM mampu menentukan pilihan dan pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, serta dapat terhindar dari aktivitas investasi pada instrument keuangan yang tidak jelas.

Di Indonesia kebijakan Financial Inclusion baru diluncurkan pada tahun 2010, lalu Bank Indonesia juga meluncurkan sebuah program yang bertujuan

untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan yaitu National Strategy for Financial Inclusion. Selama ini, 32% atau 76 juta penduduk sama sekali belum tersentuh jasa keuangan (financial exclusion). Selain itu, 60-70% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga belum memiliki akses terhadap perbankan. Padahal hampir 53 juta masyarakat miskin yang bekerja di sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Provinsi Sumatera Utara termasuk pada provinsi yang mengalami tingkat perkembangan perekonomian yang cukup baik jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di Indonesia. Tercatat bahwa provinsi Sumatera Utara merupakan termasuk kota besar yang berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Namun berdasarkan data yang disampaikan oleh Bank Indonesia, Sumatera Utara masih dalam kategori underbanked. Sumatera Utara walaupun termasuk provinsi yang memiliki potensi sumber daya ekonomi yang cukup baik namun dalam hal penggunaan jasa keuangan masih dalam kategori rendah. Ini dapat menjadi indikasi bahwa pemerataan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara belum merata, dan pengetahuan mengenai jasa keuangan juga belum terserap di seluruh pelosok negeri.

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kotamadya. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan dimana jumlah penduduk Sumatera Utara pada 2020 sebanyak 14,8 juta jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 7,42 juta jiwa (49,9%) dan perempuan sebesar 7,38 juta jiwa. Pada tahun 2019 sebanyak 7,28 juta jiwa penduduk tinggal di perkotaan dan 7,27 juta jiwa tinggal di pedesaan. Indeks literasi keuangan Untuk Sumatera Utara sendiri di tahun 2016

sebesar 32.36% lebih tinggi daripada nasional. Survei OJK tahun 2019 menunjukkan Indeks literasi Keuangan sebesar 38.03%, sedangkan Indeks Inklusi Keuangan untuk provinsi Sumatera Utara sebesar 76.19%. Pencapaian itu jauh di atas hasil survei OJK pada tahun 2016 yang untuk indeks literasi keuangan 28,7 persen dan indeks inklusi keuangan 67,8 persen.

Tabel 1.1 Indeks inklusi keuangan berdasarkan Provinsi di Indonesia

No	Provinsi	Komposit	Konvensional	Syariah
1	Aceh	86,09%	86,09%	18,04%
2	Sumatera Utara	93,98%	90,84%	15,45%
3	Sumatera Barat	66,75%	63,87%	22,25%
4	Riau	86,39%	84,82%	14,40%
5	Jambi	64,83%	63,52%	7,87%
6	Sumatera Selatan	86,09%	86,09%	18,04%
7	Bengkulu	85,65%	85,65%	6,56%
8	Lampung	61,94%	61,41%	5,77%
9	Kepulauan Bangka Belitung	64,57%	64,30%	7,07%
10	Kepulauan Riau	92,13%	92,13%	7,61%
11	DKI Jakarta	97,76%	92,67%	35,60%
12	Jawa Barat	88,48%	85,34%	21,99%
13	Jawa Tengah	65,71%	65,45%	12,57%
14	DI Yogyakarta	76,12%	75,85%	8,92%
15	Jawa Timur	87,96%	87,70%	23,56%
16	Banten	84,29%	78,27%	14,40%
17	Bali	92,91%	92,65%	4,72%
18	Nusa Tenggara Barat	62,73%	61,42%	16,27%
19	Nusa Tenggara Timur	60,63%	60,37%	1,57%
20	Kalimantan Barat	75,33%	74,54%	13,39%
21	Kalimantan Tengah	75,33%	74,54%	13,39%
22	Kalimantan Selatan	75,54%	73,75%	5,25%
23	Kalimantan Timur	92,39%	92,39%	3,15%
24	Kalimantan Utara	65,09%	64,83%	0,26%
25	Sulawesi Utara	83,99%	83,73%	5,25%
26	Sulawesi Tengah	84,51%	83,73%	8,14%
27	Sulawesi Selatan	86,91%	86,91%	10,47%
28	Sulawesi Tenggara	75,07%	75,07%	0,52%
29	Gorontalo	60,89%	60,63%	0,26%
30	Sulawesi Barat	62,99%	62,20%	3,41%
31	Maluku	75,62%	64,83%	3,41%
32	Maluku Utara	75,85%	75,85%	4,46%
33	Papua Barat	59,84%	59,84%	1,57%
34	Papua	60,89%	60,63%	2,36%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan 2021

Dari tabel diatas dapat kita lihat perkembangan inklusi keuangan Sumatera Utara menduduki posisi tertinggi dalam perkembangan inklusi keuangan dengan jumlah 92,98%. Hasil tersebut diperoleh dari gabungan antara inklusi keuangan konvensional dan syariah. Sumatera utara sendiri memiliki 33 Kabupaten /Kota didalamnya.

Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan populasi di tahun 2020 mencapai 2.295.003 jiwa. Medan terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Posisi koordinatnya adalah 3°35'LU dan 98°40'BT. Kota Medan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara dan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, timur, dan utara.

Medan Sumatera menjadi tempat yang strategis sebab berada di jalur pelayaran Selat Malaka. Dengan demikian, kota ini menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi domestik dan mancanegara yang melalui Selat Malaka. Selain itu, Medan juga berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan juga beberapa daerah kaya sumber daya alam, mempengaruhi kemampuan Medan dalam hal ekonomi sehingga memiliki hubungan kerjasama yang saling memperkuat dengan daerah sekitarnya.

Jika di peroleh dari hasil pengolahan data bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan masyarakat Kota Medan dengan nilai probability (0,008) dan besarnya pengaruh yang diberikan adalah 67,09%. Artinya literasi keuangan yang semakin baik akan memiliki dampak yang kuat dan nyata terhadap perilaku keuangan masyarakat juga semakin baik dalam mengelola keuangannya sehingga dapat memperbaiki

kehidupan ekonomi masyarakat dan juga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Medan.

Sedangkan untuk Kabupaten Langkat yang merupakan tujuan dari penelitian ini, Indeks literasi Keuangannya menunjukkan tingkat yang rendah, pemerintah daerah berharap penyediaan akses keuangan terus ditingkatkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah. Agar lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, meningkatkan pengetahuan, peningkatan minat, meningkatkan kepercayaan terhadap industri keuangan.

Tabel 1.2 Kepadatan penduduk Kabupaten Langkat menurut kecamatan

Kecamatan	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa/km ²)		
	2017	2018	2019
Bohorok	38	39	39
Sirapit	172	173	174
Salapian	124	125	126
Kutambaru	60	61	61
Sei Bingai	155	156	157
Kuala	202	203	204
Selesai	440	443	445
Binjai	1074	1082	1089
Stabat	804	810	815
Wampu	222	223	225
Batang Serangan	41	42	42
Sawit Seberang	128	129	130
Padang Tualang	224	226	227
Hinai	482	485	488
Secanggang	300	302	304
Tanjung Pura	381	384	386
Gebang	253	255	256
Babalan	784	789	794
Sei Lapan	177	178	179
Brandan Barat	259	261	263
Besitang	65	65	66
Pangkalan Susu	292	294	295
Pematang Jaya	66	66	67
Kabupaten Langkat	164	165	166

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilihat dari tabel diatas kepadatan penduduk kabupaten langkat terus meningkat setiap tahunnya. Salah satunya Kecamatan Brandan Barat yang

menjadi lokasi penelitian penulis. Kecamatan tersebut terdapat di Pangkalan Brandan, pada kecamatan tersebut dijumpai dominan desa tertinggal. Padahal jika mengkaji pada masa lalu tahun 1883 minyak bumi pertama Indonesia di temukan di Kabupaten Langkat. Minyak bumi telaga said menjadi lapangan minyak pertama dan titik awal produksi minyak bumi di indonesia.

Dengan gempuran munculnya minyak bumi di Pangkalan Brandan menarik perhatian masyarakat luar yang ingin melakukan perdagangan di kota tersebut. Salah satunya berasal dari Malaysia yaitu Nyak Haris, beliau adalah seorang utusan dari kesultanan pasai. Ia, merupakan salah satu pendiri desa pesisir yang berada di Pangkalan Brandan Kecamatan Brandan Barat yaitu desa perlis pada tahun 1880. Desa tersebut terletak di tepi pulau yang berada di tengah aliran sungai Babalan. Bahkan pemukiman warga banyak berdiri diatas sungai babalan tersebut.

Potensi wilayah pesisir yang pemanfaatan paling besar dan menjadi tulang punggung wilayah pesisir adalah perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Berdasarkan data dari Kementerian Perikanan dan Kelautan (2014) pada tahun 2014 volume produksi perikanan tangkap sebesar 6,2 juta ton yang terdiri dari 5,78 juta ton (93,23 persen) perikanan laut dan sisanya 420.000 ton (6,77 persen) berasal dari perikanan tangkap di perairan umum. Selain berasal dari perikanan tangkap, wilayah pesisir juga menyimpan potensi melalui perikanan budidaya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah pesisir sebagai penghasil utama perikanan mempunyai peran yang sangat besar dalam perekonomian dan

tentunya masih memiliki potensi yang besar dan peluang untuk dikembangkan. Dilihat dari berbagai potensinya, wilayah pesisir sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Namun pada dasarnya, ekosistem pesisir memiliki fungsi dalam hal ekonomi karena aspek sumberdaya alamnya yang sangat berlimpah sehingga dapat dimanfaatkan baik dalam bentuk pariwisata maupun eksploitasi.

Salah satu kabupaten di wilayah pesisir Pantai Timur Sumatera Utara yang memiliki potensi yang besar adalah Kabupaten Langkat. Secara administratif saat ini Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan dan 277 desa/kelurahan dengan luas wilayah 6.263,29 km². Berbagai penjelasan tersebut di atas sudah jelas menggambarkan betapa wilayah pesisir menyimpan potensi yang sangat besar. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi sampai saat ini adalah bahwa kawasan pesisir masih sangat termarjinalkan oleh karena desa-desa pesisir sangat berpotensi menjadi kantong-kantong kemiskinan. Masyarakat pesisir yang mendiami desa-desa pesisir kehidupannya sangat memprihatinkan, terampas hak-haknya sehingga menjadi miskin. Kemiskinan di daerah pedesaan menjadi penyebab dan akibat terjadinya kerusakan sumberdaya alam pedesaan yang berdampak pada masyarakat luas.

Kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang dihadapi oleh rumahtangga nelayan di desa pesisir berakar dari faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan kedalam faktor alamiah dan non alamiah. Faktor alamiah berkaitan dengan fluktuasi musim penangkapan dan struktur alamiah sumberdaya ekonomi desa. Faktor non alamiah berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan,

ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya jaringan pemasaran dan belum berfungsinya koperasi nelayan yang ada, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang telah berlangsung sejak seperempat abad terakhir ini.

Berdasarkan Latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai perkembangan Literasi Keuangan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Analisis Persepsi Literasi Keuangan Masyarakat Pesisir Desa (Studi Kasus: Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Indonesia masih tertinggal dalam hal literasi keuangan dengan hanya mencakup 32% dari total penduduk, sedangkan Malaysia dan Singapura masing-masing mencapai 36% dan 59% disusul dengan Thailand 27%, Filipina 25%, Vietnam 24% dan Cambodia 18%.
2. Banyaknya lembaga keuangan di Indonesia namun hanya sebagian masyarakat yang terakses dalam lembaga keuangan.
3. Kurangnya literasi keuangan pada masyarakat yang ada di pelosok Sumatera Utara.
4. Tingkat literasi keuangan sendiri juga memiliki tingkatan-tingkatan tertentu, berdasarkan level pemahaman yang dimiliki masyarakat. Hal tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal.

5. Kabupaten Langkat merupakan tujuan dari penelitian ini, indeks literasi keuangannya menunjukkan tingkat yang rendah, pemerintah daerah berharap penyediaan akses keuangan terus di tingkatkan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan waktu dan kemampuan yang dimiliki, peneliti membatasi pada masalah persepsi perkembangan literasi keuangan dan inklusi keuangan di wilayah Kecamatan Brandan Barat yaitu desa Perlis dan Klantan dengan tingkat pengetahuan masyarakat pesisir dan terakses atau tidaknya masyarakat tersebut kepada lembaga keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dan Sumatera Utara tahun 2016-2021?
2. Faktor apa saja yang berhubungan dengan aksesibilitas lembaga keuangan serta persepsi literasi keuangan masyarakat wilayah pesisir di Kabupaten Langkat?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dan Sumatera Utara pada tahun 2016-2021.
2. Melakukan analisa faktor dan analisis persepsi masyarakat terhadap aksesibilitas lembaga keuangan, dan literasi keuangan di wilayah pesisir Kabupaten Langkat.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

1. Sebagai bahan gambaran kepada mahasiswa yang ingin mengetahui tentang literasi keuangan masyarakat desa. Terutama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi mahasiswa Ekonomi khususnya mahasiswa Ilmu Ekonomi Study Pembangunan.
3. Untuk Menambah dan melengkapi sekaligus sebagai perbandingan hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyangkut topik yang sama.

2. Bagi Non Akademik

1. Mensosialisasikan tentang literasi keuangan bahwasannya setiap individu penting terakses dengan lembaga keuangan.
2. Sebagai referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.
3. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan yang tepat, terutama yang berkaitan dengan literasi keuangan di Kecamatan Brandan Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Uang dan Lembaga Keuangan

A. Definisi Uang

Uang diartikan sebagai alat tukar umum atau alat pengukur nilai benda/kekayaan yang berfungsi untuk memudahkan penukaran bendabenda/barang-barang, jasa-jasa, pembayaran-pembayaran dan pinjam meminjam dalam hubungan ekonomi di dalam suatu negara atau antar negaranegara (Aliminsyah & Padji, 2006).

Menurut para ekonom menggunakan istilah "uang" dengan cara yang lebih khusus. Uang tidak mengacu pada semua kekayaan tetapi hanya pada satu jenisnya: uang adalah persediaan aset yang dapat segera digunakan untuk melakukan transaksi. Secara kasar yang merupakan persediaan negara (Mankiw, 2005).

Menurut Robertson dan AC. Pigon mengenai definisi mereka terhadap uang, menekankan peranan uang sebagai alat tukar, sedangkan Rollin G. Thomas memberikan definisi uang secara lebih luas dengan memberikan pengertian bahwa uang adalah sesuatu yang siap (dicairkan) dan dapat diterima umum dalam transaksi- transaksi barang dan jasa, serta dapat diterima dalam pembayaran hutang (Rahardjo, 2009).

B. Fungsi Uang

Uang memiliki tiga tujuan yaitu penyimpan nilai, unit akun, dan media pertukaran.

1. Sebagai penyimpan nilai, uang adalah cara untuk mentransfer daya beli dari hadir ke masa depan. Tentu saja, uang adalah ketidak sempurnaan penyimpan nilai, jika harga naik, jumlah yang dapat Anda beli dengan jumlah uang tertentu akan turun. Meski begitu, orang memegang uang karena mereka bisa menukarnya dengan barang dan jasa pada suatu waktu di masa depan.
2. Sebagai unit hitung, uang menyediakan persyaratan di mana harga dikutip dan utang dicatat. Ekonomi mikro mengajarkan kita bahwa sumber daya dialokasikan menurut harga relatif. Di sisi lain, sebagian besar utang mengharuskan debitur untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu dalam masa depan, bukan jumlah tertentu dari beberapa komoditas. Uang adalah tolok ukur dengan yang kita ukur transaksi ekonomi.
3. Sebagai alat tukar, uang adalah apa yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa. Saat kami masuk ke toko, kami yakin bahwa penjaga toko akan menerima uang kami sebagai ganti barang yang mereka jual. Kemudahan dengan dimana suatu aset dapat diubah menjadi alat tukar dan digunakan untuk membeli barang dan jasa lainnya kadang-kadang disebut likuiditas aset. Karena uang adalah alat tukar, itu adalah aset ekonomi yang paling likuid (Mankiw, 2005).

Untuk lebih memahami fungsi uang, coba bayangkan ekonomi tanpa ekonomi barter. Di dunia seperti itu, perdagangan membutuhkan kebetulan ganda keinginan yang tidak mungkin terjadi dari dua orang yang masing-masing memiliki barang yang keinginan lain pada waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan pertukaran. Ekonomi barter hanya mengizinkan transaksi sederhana.

C. Jenis-Jenis Uang

Uang memiliki banyak bentuk. Dalam perekonomian masyarakat melakukan transaksi dengan item yang satu-satu fungsinya adalah untuk bertindak sebagai uang kertas. Uang yang tidak memiliki nilai intrinsik disebut uang fiat karena ditetapkan sebagai uang oleh keputusan pemerintah, atau fiat (Mankiw, 2005).

Uang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan kepada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan keperluan beberapa pihak yang membutuhkan (Kasmir, 2014).

Adapun jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan bahan
 - a. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil.

b. Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah di bawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, idak mudah robekatau luntur.

2. Berdasarkan nilai

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai instrinsiknya (bahan uang) atau nominalnya (nilai yang tertera dalam uang tersebut).

a. Bernilai penuh (*full bodied money*), merupakan uang yang nilai instrinsiknya sama dengan nominalnya, sebagai contoh uang logam, di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang.

b. Tidak bernilai penuh (*representatif full bodied money*) merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Sebagai contoh uang yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini disebut uang bertanda atau *token money*. Kadangkala nilai instrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di dalamnya.

3. Berdasarkan lembaga

Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan/ mengeluarkan uang.

a. Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral baik uang logam maupun kertas.

- b. Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveller cheque, dan credit card.

2.1.2 Lembaga Keuangan

A. Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Kuncoro, 2000).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung (Kasmir, 2014).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank Sentral, yakni jenis bank yang bertugas untuk menerbitkan uang kertas dan juga uang logam untuk dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara dan juga mempertahankan konversi uang yang dimaksud terhadap emas maupun perak maupun keduanya (Kasmir, 2014).

Bank sentral adalah sebuah organisasi yang berada diantara pemerintah dan perbankan. Bank sentral merupakan institusi yang berevolusi secara alami dari bank swasta yang berperan khusus sebagai bank pemerintah, kemudian berkembang menjadi institusi indeoenden, yang memiliki peran sentral menjaga kestabilan ekonomi, terutama yang bersumber dari ketidakmampuan bank-bank dalam menghadapi sebuah guncangan.

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dimana bank menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk produk simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk jasa bank lainnya.

Sedangkan Bank Syariah, merupakan bank menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya. Prinsip Syariah yang di terapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharaba), pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal (musharakah) prinsip jual beli barang dalam memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

(Kasmir,2014).

1. Jenis-jenis bank

1) Dari segi fungsinya

a. Bank Umum, yakni jenis bank yang bukan saja dapat untuk meminjamkan ataupun menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, namun tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri suatu uang giral.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah islam dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit daripada bank umum dimana hanya melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasinya BPR juga dibatasi.

2) Dari segi Kepemilikan

Akta pendirian dan penguasaan merupakan dasar dari kepemilikan bank. Bank dapat dikategorikan menjadi empat jenis berdasarkan dari kepemilikannya:

a. Bank pemerintah, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian atau sepenuhnya oleh pemerintah contoh Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara.

b. Bank swasta, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pihak swasta contohnya Bank Central Asia (BCA), Bank

Danamon, Bank Mega, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Maybank, Bank MNC, Panin Bank, Bank OCBC NISP, Bank UOB, Bank Permata, Bank Sinarmas.

3) Dari segi status

Yang dimaksud dengan status merupakan ukuran kemampuan bank untuk melayani masyarakat dari segi jumlah produk, modal serta kualitas layanan. Untuk segi ini bank dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

- a. Bank Devisa, yaitu bank yang dapat melayani masyarakat untuk transaksi luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing seperti transfer ke luar negeri, travellers cheque, transaksi luar negeri lainnya.
- b. Bank Non Devisa, yaitu bank yang memiliki hak untuk melaksanakan transaksi seperti bank devisa hanya saja wilayahnya terbatas untuk negara tertentu saja.

4) Dari segi prinsip

Secara umum bank berdasarkan prinsip transaksinya terbagi dua antara bank konvensional dan bank Syariah.

- a. Bank Konvensional, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dimana bank menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk produk simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk jasa bank lainnya.
- b. Bank Syariah, merupakan bank menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya. Baik itu produk simpanan, pembiayaan usaha ataupun kegiatan lainnya.

B. Bukan Perbankan (*Non Banking*)

Sebagai lembaga keuangan yang tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, maka kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan LKBB adalah mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai kegiatan investasi dana tau konsumsi individu perusahaan. Beberapa LKBB yang umumnya terdapat di dalam suatu perekonomian adalah perusahaan asuransi, lembaga dana pensiun, perusahaan investasi, perusahaan pembiayaan, dan pegadaian (Manurung & Rahardja, 2007).

1. Perusahaan Asuransi

Produk jasa yang ditawarkan perusahaan asuransi adalah perlindungan *finansial* untuk mengahapi berbagai hal yang kurang menguntungkan, misalnya kecelakaan, sakit keras bahkan kematian. Perusahaan asuransi merupakan sumber dana jangka panjang yang amat potensial bagi *sector* swasta. Sebab uang yang dipegang perusahaan asuransi sangat besar, sedangkan kewajibannya baru jatuh tempo dalam jangka waktu yang sangat panjang.

2. Lembaga Dana Pensiun

Lembaga ini menawarkan jasa berupa persiapan dana pensiun. Bagi pegawai perusahaan swasta, jasa dana pension dapat memberikan ketenangan dan jaminan hari tua, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Lembaga dana pension juga merupakan sumber dana potensial bagi dunia usaha. Sebab, sama seperti perusahaan asuransi, kewajiban dana pensiun baru

jatuh tempo dalam jangka waktu yang sangat panjang, sehingga menjadi sumber dana jangka panjang.

3. Perusahaan Investasi

Produk yang ditawarkan perusahaan investasi adalah diversifikasi (*Diversification*). Yang dimaksud dengan diversifikasi adalah peningkatan kemampuan memabeli atau memiliki berbagai jenis atau tipe aset finansial.

4. Perusahaan Pembiayaan

LKBB umumnya mengumpulkan dana dari individu/organisasi dalam jumlah-jumlah kecil, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman berskala besar. Tetapi lembaga pembiayaan melakukan hal yang sebaliknya, karena meminjam dalam bentuk pinjaman skala besar, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kecil-kecil kepada individu atau unit usaha kecil.

Di Indonesia berdasarakan Keppres No. 61/1988, kegiatan-kegiatan usaha yang masuk dalam lingkup perusahaan pembiayaan adalah: sewa guna (*leasing*), modal ventura (*capital venture*), anjak piutang (*factoring*). Pembiayaan konsumen (*consumer finance*), kartu kredit (*credit card*), dan perdagangan surat-surat berharga (*securities company*). Dalam perkembangan selanjutnya, di tahun 1989 bidang usaha penjualan surat berharga dikeluarkan dari lingkup perusahaan pembiayaan. Tahun 1995, bidang usaha modal ventura menyusul dikeluarkan dari ruang lingkup perusahaan pembiayaan.

5. Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga perkredian berdasarkan hukum gadai. Lembaga ini awalnya berkembang di Italia yang kemudian menyebar ke wilayah-wilayah Eropa lainnya. Praktik pegadaian di Indonesia di rintis oleh orang Belanda melalui VOC.

Lembaga pegadaian pada prinsipnya memberi bantuan keuangan dengan jaminan aset peminjaman , yang diserahkan kepada lembaga pegadaian. Aset tersebut akan dikembalikan bila peminjam telah melunasi utang berikut bunganya. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan sekitar 80-80% dari nilai perkiraan (nilai taksir) aset yang digadaikan. Peminjam dapat melunasi utangnya setiap saat, tanpa harus menunggu jatuh tempo.

Karena prosedur peminjamannya sangat sederhana, mudah dan cepat , pegadaian di Indonesia termasuk sumber dana yang banyak diminati masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah (Manurung & Rahardja, 2007).

2.1.3 Permintaan Uang (*Money demand*)

Sekarang kita beralih ke sisi lain pasar uang dan memeriksa apa yang menentukan permintaan uang. Kali ini menggunakan permintaan uang sederhana fungsi. Kami mulai dengan teori kuantitas, yang mengasumsikan bahwa permintaan keseimbangan riil sebanding dengan pendapatan. Kemudian mempertimbangkan uang yang lebih umum dan realistis, fungsi permintaan yang mengasumsikan permintaan keseimbangan uang riil tergantung pada tingkat bunga maupun pendapatan.

Tentu saja, masih banyak lagi yang bisa dikatakan tentang apa yang menentukan seberapa banyak uang yang dipilih orang untuk dipegang. Sama seperti studi tentang fungsi konsumsi mengandalkan pada model ekonomi mikro dari keputusan konsumsi, studi tentang uang fungsi permintaan bergantung pada model ekonomi mikro dari keputusan permintaan uang. Di bagian ini pertama-tama kita membahas secara luas berbagai cara untuk memodelkan permintaan uang. Kami kemudian mengembangkan satu model yang menonjol.

Uang memiliki tiga fungsi: ia adalah unit hitung, penyimpan nilai, dan alat tukar. Fungsi pertama uang sebagai unit dari rekening tidak dengan sendirinya menghasilkan permintaan uang, karena seseorang dapat mengutip harga dalam dolar tanpa memegang apapun. Sebaliknya, uang dapat melayaninya dua fungsi lainnya hanya jika orang memegangnya. Teori permintaan uang menekankan peran uang baik sebagai penyimpan nilai atau sebagai alat tukar (Mankiw, 2009).

A. Teori permintaan Uang Klasik

Faktor yang menentukan permintaan uang dalam pandangan dijelaskan dengan menggunakan teori kuantitas (*quantity theory*) dan teori sisa tunai (*cash-balance theory*). Menurut Irving Fisher teori kuantitas uang sebagai berikut (Sukirno, 2011):

$$MV = PT \dots\dots\dots 2.1$$

M = penawaran uang

V = perputaran uang

P = tingkat harga

T = volume barang yang diperdagangkan dalam suatu tahun tertentu.

Menurut Fisher, nilai V ditentukan oleh kebiasaan pembayaran gaji dan efisiensi lembaga keuangan. Sehingga nilai V relatif tetap, karena faktor-faktor yang menentukan nilai V adalah tetap atau dapat dikatakan tidak berubah. Dalam suatu periode tertentu, kuantitas barang yang diperdagangkan T jumlahnya tertentu. Sehingga pada keadaan keseimbangan (*full employment*) nilai T adalah tetap dan telah mencapai tingkat yang maksimum. Jadi para ahli ekonomi klasik mengatakan bahwa perubahan yang terjadi pada permintaan uang hanya akan berpengaruh terhadap harga karena nilai V dan T adalah tetap.

Menurut teori klasik yang kedua yaitu teori *cash-balance theory* yang dikembangkan oleh A. Marshall dan A.C Pigou, dari *Cambridge University*. Teori ini menekankan pada tujuan masyarakat dalam permintaan uang dan pengaruh pada jumlah uang yang diperlukan oleh masyarakat. Menurut Marshall tujuan seseorang memegang uang adalah untuk keperluan transaksi. Kemudian Pigou menambahkan alasan lain yaitu masyarakat memegang uang memiliki tujuan untuk berjaga-jaga. Sehingga didapatkan formulasi sebagai berikut:

$$M_t = k \cdot Y \dots\dots\dots 2.2$$

Dimana M_t adalah kebutuhan uang untuk transaksi di suatu waktu, Y adalah pendapatan nasional dan K adalah besar kecilnya keinginan masyarakat untuk memegang bagian dari pendapatan/kekayaannya dalam bentuk kas. Teori kuantitas yang lebih menitikberatkan pada hubungan antara uang dan harga, maka Rumus Marshall merupakan hubungan antara jumlah uang dengan pendapatan nasional. Teori Marshall merupakan dasar dari *Demand for Money*. Pandangan

Marshall tentang “kY” merupakan cikal bakal Liquidity Preference Theory dari Keynes.

B. Teori Permintaan Uang Keynes

Teori permintaan Keynes memiliki perbedaan dari teori permintaan uang klasik. Keynes menambahkan fungsi uang yang lain yaitu sebagai penyimpan kekayaan (*store of value*). Didalam teorinya Keynes berpendapat terdapat tiga motif seseorang dalam memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi (Nopirin,1992).

1. Motivasi Transaksi (*Transaction Motive*)

Permintaan uang untuk transaksi dalam teori Keynes adalah sama dengan permintaan uang dalam teori klasik. Masyarakat memegang uang (*holding money*) dalam rangka mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Permintaan uang untuk transaksi berhubungan positif dengan tingkat pendapatan; Bila pendapatan meningkat, maka kebutuhan uang untuk transaksi meningkat.

2. Motivasi Berjaga-jaga (*Precautionary Motive*)

Hal lain yang juga memotivasi orang memegang uang adalah persiapan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan dan atau tak terduga, misalnya sakit atau mengalami kecelakaan. Permintaan uang untuk berjaga-jaga juga berhubungan positif dengan tingkat pendapatan; Jika pendapatan meningkat, permintaan uang untuk berjaga-jaga juga meningkat. Karena permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga berhubungan searah dengan tingkat pendapatan, maka hubungannya dapat diekspresikan sebagai berikut:

$$M_t = f(Y) \dots\dots\dots 2.3$$

Dimana: M_t : Permintaan uang untuk transaksi berjaga

Y : Pendapatan

$$\frac{6M_t}{6Y} \geq 0 \dots\dots\dots 2.4$$

3. Motivasi Mendapatkan Keuntungan (*Speculation Motive*)

Konsekuensi dari fungsinya sebagai penyimpan nilai (*stock of value*), uang dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Motivasi menyimpan uang untuk memperoleh keuntungan disebut sebagai motivasi spekulasi (*speculation motive*). Keynes mengembangkan teori ini berdasarkan asumsi bahwa uang adalah salah satu dari dua aset financial yang dapat dimiliki masyarakat. Aset yang lainnya adalah obligasi (*bond*) yaitu surat utang yang disertai janji memberikan pendapatan bunga. Jenis obligasi yang dimaksudkan oleh Keynes adalah obligasi yang jatuh temponya tidak terbatas (*consol bond*) dan tidak memiliki resiko gagal ditagih (*default*).

C. Teori Portofolio Permintaan Uang

Teori permintaan uang yang menekankan peran uang sebagai penyimpan nilai disebut teori portofolio. Menurut teori ini, orang memegang uang sebagai bagian dari portofolio aset mereka. Wawasan kuncinya adalah bahwa uang menawarkan kombinasi risiko dan pengembalian yang berbeda dari aset lainnya. Secara khusus, penawaran uang pengembalian (nominal) yang aman, sedangkan harga saham dan obligasi dapat naik atau turun. Dengan demikian, beberapa ekonom telah menyarankan bahwa rumah tangga memilih untuk menyimpan uang sebagai bagian dari portofolio optimal mereka.

Teori portofolio memprediksi bahwa permintaan uang harus bergantung pada risiko dan pengembalian yang ditawarkan oleh uang dan berbagai aset yang dapat dimiliki rumah tangga bukannya uang. Selain itu, permintaan uang harus bergantung pada total kekayaan, karena kekayaan mengukur ukuran portofolio yang akan dialokasikan di antara uang dan aset alternatif. Sebagai contoh, kita dapat menulis permintaan uang berfungsi sebagai

$$(M/P) d = L(r_s, r_b, E_\pi, W) \dots\dots\dots 2.5$$

dimana r_s , adalah pengembalian riil yang diharapkan atas saham, r_b adalah pengembalian riil yang diharapkan obligasi, E_π , adalah tingkat inflasi yang diharapkan, dan W adalah kekayaan riil. Kenaikan r_s , atau r_b mengurangi permintaan uang, karena aset lain menjadi lebih menarik. Sebuah kenaikan E_π , juga mengurangi permintaan uang, karena uang menjadi kurang menarik. (Ingat bahwa E_π , adalah pengembalian riil yang diharapkan untuk memegang uang.) Peningkatan di W meningkatkan permintaan uang, karena kekayaan yang lebih besar berarti portofolio yang lebih besar.

Dari sudut pandang teori portofolio, kita dapat melihat permintaan fungsi uang, $L(i, Y)$, sebagai penyederhanaan yang berguna. Pertama, ia menggunakan pendapatan riil Y sebagai proxy untuk kekayaan nyata W . Kedua, satu-satunya variabel pengembalian yang disertakan adalah tingkat bunga nominal, yang merupakan jumlah pengembalian riil obligasi dan inflasi yang diharapkan (yaitu, $i = r_b + E_\pi$). Menurut teori portofolio, bagaimanapun, fungsi permintaan uang harus mencakup pengembalian yang diharapkan juga aset lainnya (Mankiw,2009).

2.1.4 Teori Prilaku Konsumen

Teori perilaku konsumen adalah penggambaran bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan diantara berbagai barang dan jasa yang tersedia untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka (Pindyck & Rubinfeld, 2012).

Perilaku konsumen dikatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seorang individu atau disebut konsumen yang secara langsung terlibat dalam rangka mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini (Engel, Roger , & Paul, 2004).

Perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seorang konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk memperoleh alat-alat kebutuhan dan memilih suatu produk atau jasa yang tersedia akan memberikan kepuasan maksimum. Perilaku konsumen ini dapat dipahami melalui tiga langkah sebagai berikut (Pindyck & Rubinfeld, 2012).

1. **Preferensi/Selera Konsumen:** Langkah pertama adalah mencari cara yang praktis untuk menggambarkan alasan orang-orang lebih tertarik kepada satu produk ketimbang produk lain. Hal ini dapat melihat bagaimana preferensi konsumen atas berbagai barang dapat digambarkan secara grafis dan aljabar.
2. **Kendala Anggaran:** Tentu saja, konsumen akan mempertimbangkan harga. Pada langkah yang kedua ini, untuk mempertimbangkan fakta bahwa konsumen memiliki batasan pendapatan yang membatasi kuantitas barang yang akan dibeli. Apa yang dapat dilakukan konsumen dalam situasi

tersebut? Maka jawaban atas pertanyaan tersebut dengan mengombinasikan preferensi konsumen dan kendala anggaran pada langkah ketiga.

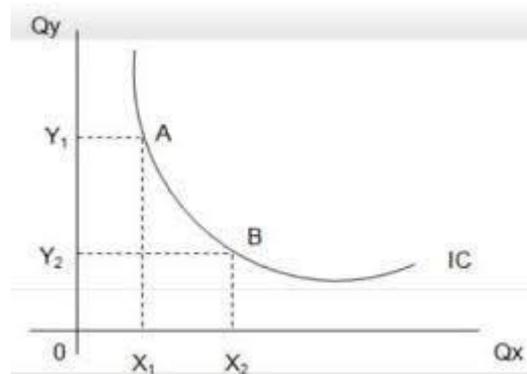
3. Pilihan Konsumen: Dengan selera dan pendapatan konsumen terbatas yang ada, konsumen memilih untuk membeli kombinasi barang yang memaksimalkan kepuasan mereka. Kombinasi ini bergantung pada harga berbagai barang. Oleh karena itu, memahami pilihan konsumen akan membantu dalam memahami permintaan-yaitu, berapa kuantitas barang yang akan konsumen pilih untuk dibeli bergantung pada harganya.

Ketiga langkah tersebut merupakan dasar teori konsumen. Sejumlah aspek lainnya yang dapat dilihat mengenai perilaku konsumen. Seperti saat memperkirakan sifat preferensi atau selera konsumen melalui pengamatan aktual atas perilaku konsumen. Jadi, ketika seorang konsumen akan memilih satu barang diantara barang yang serupa dengan harga yang sama, maka dapat diduga bahwa konsumen tersebut cenderung menyukai barang yang pertama. Kesimpulan yang sama juga dapat diambil dari keputusan aktual yang dilakukan konsumen dalam merespon perubahan harga dari berbagai barang dan jasa yang tersedia untuk dibeli.

Konsumen memiliki preferensi tersendiri diantara berbagai barang dan jasa yang tersedia, dan mereka menghadapi kendala anggaran yang membatasi apa dan berapa yang dapat dibelanjakan. Tetapi kita bisa juga memandang bahwa konsumen memutuskan kombinasi barang dan jasa tertentu untuk memaksimalkan kepuasan mereka.

A. Kurva Indiferensi

Kurva Indiferensi (*Indifference Curve*) menggambarkan seluruh kombinasi keranjang belanja yang memberikan konsumen tingkat utilitas yang sama. Konsumen tersebut menjadi tidak peduli (indiferen) atas beragam keranjang belanja yang digambarkan pada titik-titik kurva.



Sumber: Pindyck, 2012

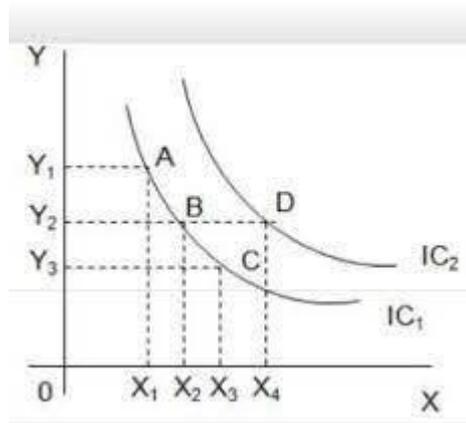
Gambar 2.1 Kurva Indiferensi

Kurva indiferensi memiliki kemiringan yang menurun, seperti contoh dalam mengonsumsi dua barang, ketika jumlah Q_y meningkat disepanjang kurva maka jumlah konsumsi untuk Q_x akan menurun, kenyataan bahwa kurva indiferensi memiliki kemiringan yang menurun didasarkan pada asumsi bahwa lebih banyak barang lebih baik dibandingkan sedikit. Pada kurva diatas, dimulai pada titik X_1 dan eralih ke titik X_2 , dapat dilihat bahwa konsumen bersedia mengorbankan barang Q_y dari Y_1 beralih ke Y_2 untuk mendapatkan barang tambahan dan begitu seterusnya.

B. Tingkat Substitusi Marginal

Tingkat Substitusi Marginal (MRS) merupakan jumlah maksimum suatu barang yang bersedia diserahkan konsumen untuk memperoleh satu unit tambahan

barang lain. Untuk mengukur jumlah suatu barang yang bersedia diserahkan konsumen demi mendapatkan lebih banyak barang lain, kita menggunakan suatu pengukuran yang disebut tingkat substitusi marginal (*marginal rate of substitution-MRS*).



Sumber: Pindyck, 2012

Gambar 2.2 Karakteristik Kurva Indiferen

C. Pendekatan Ordinal dan Kardinal

Fungsi Utilitas Ordinal, fungsi utilitas yang menghasilkan peringkat atas berbagai keranjang belanja untuk mengurutkan keranjang belanja yang paling disukai hingga yang paling tidak disukai. Suatu fungsi utilitas yang menghasilkan suatu peringkat belanja disebut dengan fungsi Utilitas Ordinal.

Fungsi Utilitas Kardinal, fungsi utilitas yang menggambarkan bagaimana suatu keranjang belanja yang lebih disukai ketimbang keranjang belanja lain. Saat para ekonom pertama kali mempelajari utilitas dan fungsi utilitas, mereka berharap bahwa preferensi individu dapat diukur dalam bentuk unit dasar sehingga dapat memberikan suatu peringkat yang memungkinkan perbandingan antar individu. Suatu fungsi yang menggambarkan seberapa besar satu keranjang

belanja lebih disukai daripada keranjang belanja lain disebut dengan fungsi Utilitas Kardinal.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi individu dalam bertindak sebagai konsumen terdiri dari (Kotler & Amstrong, 2008):

1. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan terdiri atas kultur, dan kelas sosial. Kultur dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak yang biasanya dituntun oleh naluri, manusia biasanya berperilaku sesuai dengan apa yang dipelajari dalam lingkungannya. Sehingga perilaku seseorang dalam lingkungan yang berbeda kemungkinan memiliki perbedaan antara satu sama lain.

Kelas sosial adalah masyarakat yang anggotanya cenderung memiliki nilai, perilaku dan minat yang sama. Kelas sosial diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya.

2. Faktor Sosial

Perilaku konsumen akan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial dari konsumen. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil, seperti keluarga, teman, dan adalah organisasi.

3. Faktor Pribadi

Keputusan seorang individu sebagai konsumen akan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daurhidup pembeli, jabatan,

keadaan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Umur ikut berpengaruh dalam keputusan seorang individu, karena kebutuhan dan selera seorang individu akan berubah sesuai dengan usia. Selain itu, pekerjaan seseorang akan berpengaruh terhadap barang dan jasa yang dibelinya.

Disisi lain, keadaan ekonomi berpengaruh besar terhadap produk yang akan dibelinya, sangat mempengaruhi pilihan produk sesuai dengan kemampuan status ekonomi seseorang. Gaya hidup seseorang akan mencerminkan pola kehidupan seorang individu, gaya hidup akan mempengaruhi minat yang biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang dimiliki.

4. Faktor Psikologi

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Motivasi ialah kebutuhan yang dapat cukup menekan untuk mengarahkan seseorang untuk mencari cara serta memuaskan kebutuhan tersebut. Beberapa kebutuhan sifatnya biogenik, kebutuhan ini muncul dari suatu fisiologis tertentu, seperti rasa haus, rasa lapar, rasa tidak nyaman dan sebagainya. Sementara kebutuhan lainnya bersifat psikogenik yakni kebutuhan yang muncul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan harga diri atau kebutuhan kebutuhan diterima, kebutuhan untuk diakui, dan sebagainya.

Sedangkan menurut James F. Engel – Roger D Blackwll-Paul W. Miniart (Saladin, 2003) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu:

1. Pengaruh Lingkungan

Terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga dan situasi. Sebagai dasar utama perilaku konsumen adalah memahami pengaruh lingkungan yang membentuk atau menghambat individu dalam mengambil keputusan berkonsumsi mereka. Konsumen hidup dalam lingkungan yang kompleks, dimana perilaku keputusan mereka dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut diatas.

2. Perbedaan dan Pengaruh Individu

Terdiri dari motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Perbedaan individu merupakan faktor internal (interpersonal) yang menggerakkan serta mempengaruhi perilaku. Kelima faktor tersebut akan memperluas pengaruh perilaku konsumen dalam proses keputusannya.

3. Proses Psikologis

Terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap dan perilaku. Ketiga faktor tersebut menambah minat utama dari penelitian konsumen sebagai faktor yang turut mempengaruhi perilaku konsumen dalam penambilan keputusan pembelian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anriza Witi Nasution, Marlya Fatira AK, 2019	Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi kesadaran literasi keuangan mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah di Sumatera Utara. Faktor pertama yaitu orang tua, faktor kedua yaitu pengetahuan, faktor ketiga yaitu perilaku ekonomi, dan faktor keempat yaitu gender dan teknologi informasi. Sedangkan faktor utama yang dapat membangun kesadaran literasi keuangan mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah di Sumatera Utara adalah pendidikan ayah, pendidikan ibu, dan pendapatan orang tua.
2.	Emely Lisbet Uta Bahiu, Ivonne S.	Pengaruh Literasi Keuangan, Pengelolaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap

	Saerang, Victoria N. Untu, 2021	Keuangan Terhadap Keuangan UMKM di Desa Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud	keuangan UMKM sedangkan pengolahan keuangan berpengaruh positif terhadap keuangan UMKM.
3.	Pipit Buana Sari, Handriyani Dwilita, 2018	Prospek <i>Financial Technology (Fintech)</i> di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan , Inklusi Keuangan dan Kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan <i>fintech</i> dapat berkembang pesat di Sumatera Utara. Literasi dan inklusi keuangan berkembang baik. Elektronikasi dan pemanfaatan digital technologies sudah berjalan cukup baik, diantaranya dilihat dari pembayaran gaji pegawai negeri maupun swasta dari tunai menjadi non tunai, serta penggunaan kartu dan uang elektronik.
4.	Ade Gunawan, Wimpi Siski Pirari, Maya Sari, 2020	Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan Literasi Keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Gaya Hidup memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Literasi Keuangan dan Gaya Hidup secara simultan memiliki

			pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
--	--	--	---

2.3 Regulasi/ Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat. Saat ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan masih relatif rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan. Hal ini berpengaruh pada rendahnya pemanfaatan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan.

Upaya untuk meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan diantaranya dengan menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia pada tanggal 19 November 2013 yang selanjutnya menjadi acuan bagi berbagai pihak, tidak hanya dalam pelaksanaan Edukasi Keuangan tetapi juga dalam upaya pengembangan skema terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan. Strategi ini disusun untuk merespon hasil survei nasional yang mencakup tingkat Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan masyarakat Indonesia.

Upaya dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan melalui pelaksanaan Edukasi Keuangan yang diawali dengan pengenalan mendasar terhadap Lembaga Jasa Keuangan, dan karakteristik, manfaat, biaya, dan risiko

suatu produk dan layanan jasa keuangan serta pengelolaan keuangan pribadi yang pada akhirnya diharapkan membawa perubahan positif pada perilaku keuangan masyarakat. Edukasi Keuangan dimaksud perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip terencana dan terukur, berorientasi pada pencapaian, berkelanjutan, dan kolaborasi.

Lebih lanjut lagi peningkatan Literasi Keuangan masyarakat akan mengarahkan masyarakat untuk lebih memahami kebijakan sosial dan ekonomi serta paham terhadap hak dan kewajiban sebagai Konsumen. Dengan pemahaman yang baik serta kesadaran mengenai pentingnya lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, masyarakat dapat memilih serta memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Dengan demikian tampak bahwa peningkatan Literasi Keuangan juga perlu diimbangi dengan peningkatan Inklusi Keuangan yang diwujudkan melalui (1) ketersediaan akses masyarakat terhadap Lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan; serta (2) ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat. Ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan dimaksud, dapat diperoleh melalui penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah.

Produk dan layanan jasa keuangan formal yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut perlu memiliki kualitas yang dalam

operasionalnya dapat dilakukan secara terukur, terjangkau, dan tepat sasaran. Di samping itu, juga perlu memperhatikan keberlangsungan penyediaan akses dimaksud.

Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek perlindungan konsumen yang secara tidak langsung memiliki peranan penting dalam stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketiga hal dimaksud sebagai suatu trilogi pemberdayaan Konsumen memiliki hubungan yang erat dalam mencapai financial well-being. Financial wellbeing merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk bertahan ketika terjadi krisis keuangan.

Hal ini selaras dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang dicanangkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, dimana dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif secara khusus terdapat pilar mengenai Edukasi Keuangan, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, serta perlindungan konsumen.

Berikut ini tujuan dari kelima pilar Financial Inclusion menurut Peraturan Presiden RI No.82 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2016):

1. Edukasi Keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, beberapa ada yang tidak mengetahui mengenai jasa keuangan, dan bahkan enggan untuk menggunakannya.

2. Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Hak ini mempermudah masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan.
3. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
4. Layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara nontunai.
5. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan. Selain itu, memberikan penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Kelima pilar SNKI ini harus ditopang oleh tiga fondasi sebagai berikut :

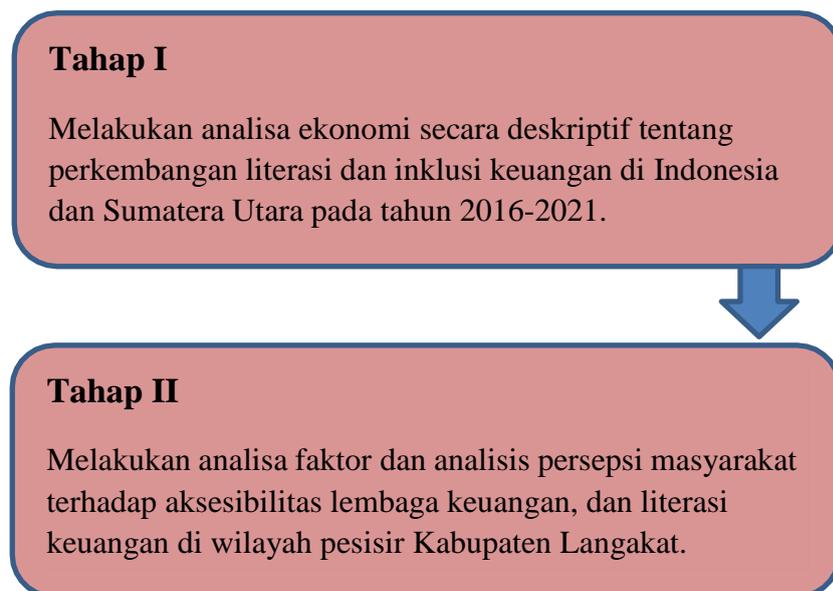
1. Kebijakan dan regulasi yang kondusif pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan otoritas/regulator.
2. Infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan.
3. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada gambar dibawah ini dan lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

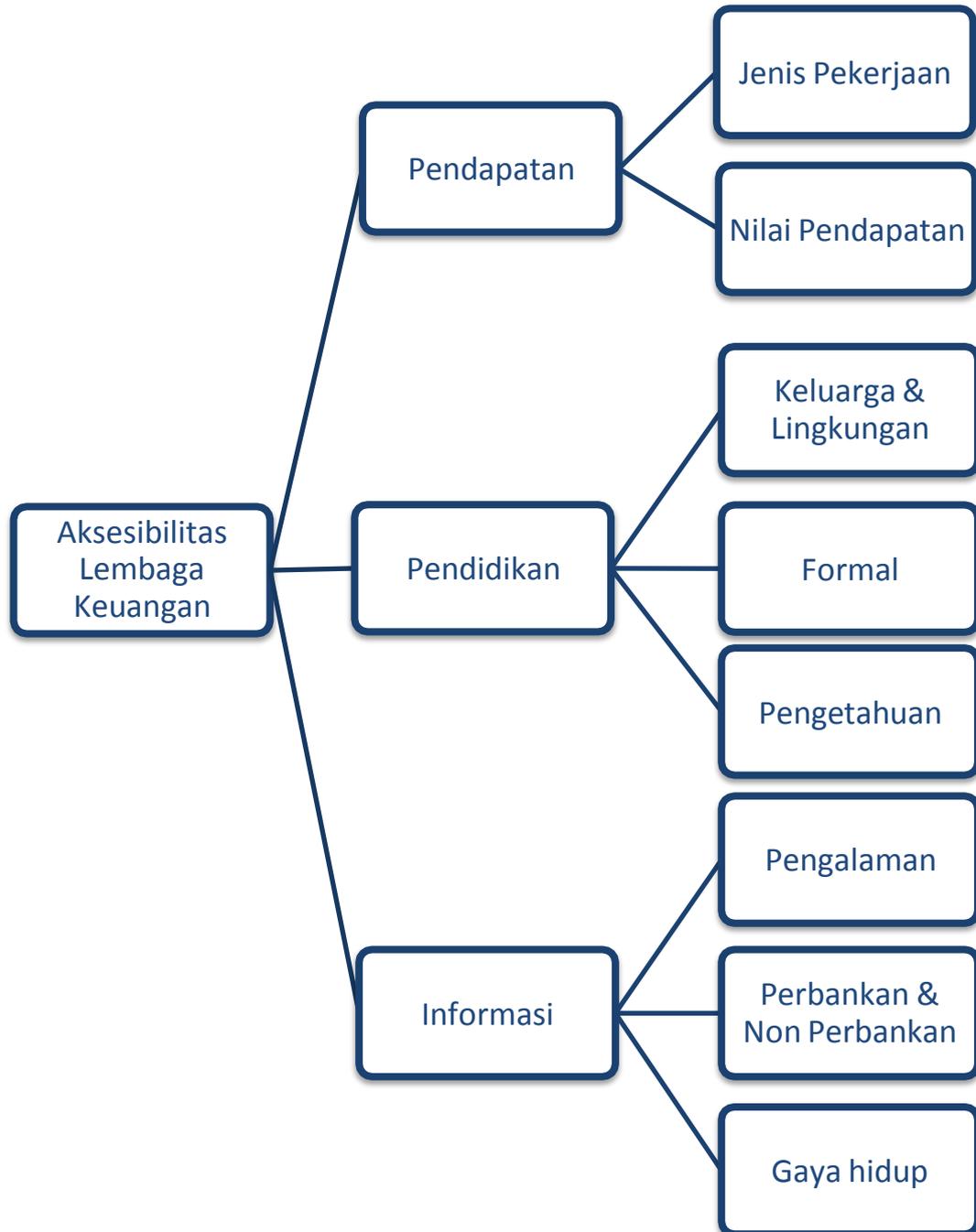
2.4.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual



2.4.2 Kerangka Konseptual Model Analisa Faktor

Gambar 2.4 Bagan Kerangka Model Analisa Fakor



2.5 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka didapat hipotesa sebagai berikut:

- Faktor Pendapatan, Pendidikan dan Informasi mempengaruhi aksesibilitas lembaga keuangan di Kecamatan Brandan Barat berpengaruh positif.
- Faktor Pendapatan, Pendidikan dan Informasi tidak mempengaruhi aksesibilitas lembaga keuangan di Kecamatan Brandan Barat berpengaruh negatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data kualitatif yaitu tidak dapat diukur dalam skala numerik(Kuncoro, 2013).

3.2 Definisi Operasional

Definisi oprasional diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terikat dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalnya variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Secara lebih rinci definisi oprasionalnya dalam penelitiannya ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Keterangan	Sumber Data
• Pendapatan	1. Jenis Pekerjaan	Jenis pekerjaan apa yang dilakukan masyarakat tersebut.	Responden
	2. Nilai pendapatan	Seberapa rendah/tinggi pendapatan masyarakat hingga	Responden

		perlu menggunakan jasa lembaga keuangan.	
• Pendidikan	1. Keluarga & Lingkungan	Mengukur pengaruh pendidikan di keluarga dan lingkungan sekitar.	Responden
	2. Formal	Mengukur sejauh mana menduduki pendidikan formal.	Responden
	3. Pengetahuan	Mengukur seberapa banyak pengetahuan masyarakat terhadap lembaga keuangan.	Responden
• Informasi	1. Pengalaman	Mengukur seberapa jauh pengalaman masyarakat dalam lembaga keuangan.	Responden
	2. Perbankan & Non Perbankan	Seberapa besar pengetahuan masyarakat tentang perbankan dan non perbankan.	Responden
	3. Gaya Hidup	Mengukur seberapa	Responden

		jauh gaya hidup masyarakat sekitar desa tersebut.	
--	--	---	--

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data Perkembangan Literasi dan Inklusi Keuangan yang di sediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan melakukan penelitian di wilayah pesisir Timur Kabupaten Langkat. Wilayah pesisir ini meliputi (Kecamatan Brandan Barat dan Kecamatan Babalan) dengan membaaur dilingkungan masyarakat.

3.3.2 Waktu Penelitian

Proses waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yakni di mulai dari bulan Juni sampai bulan Agustus 2022.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Pada umumnya data kualitatif yang bersifat data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat. Data kuantitatif adalah jenis data yang

di ukur dalam skala numerik. Pada umumnya data kuantitatif yang bersifat data nominal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori (Kuncoro, 2013).

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu dapat dengan melakukan penelitian langsung berupa menyebarkan kuesioner, wawancara langsung kepada para pengguna. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013).

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2013).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penduduk dewasa di wilayah pesisir Timur Kabupaten Langkat antara Kecamatan Brandan Barat dan Kecamatan Babalan yang tertarik dengan aksesibilitas lembaga keuangan.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah suatu himpunan dari unit populasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel nonprobabilitas karena tidak ada upaya untuk melakukan generalisasi berdasarkan sampel dengan desain sampel semacam ini, masalah representasi, (keterwakilan), tidak dipersoalkan.

Sampel nonprobabilitas : Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa yaitu sengaja, maka dimaksud purposive sampling menentukan sendiri sampel yang akan diambil secara acak, tapi ditentukan oleh peneliti, oleh karena itu peneliti hanya mengambil sebanyak 35 orang dewasa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Non-probability sampling*. Bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang untuk dijadikan data atau sampel. Data primer diperoleh menggunakan kuesioner (angket) yaitu suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti, yang bertujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan informasi yang relevan, serta informasi yang dibutuhkan dapat dibutuhkan secara serentak (Kuncoro, 2013). Dalam penelitian ini angket digunakan sebagai alat pendamping dalam mengumpulkan data. Daftar pertanyaan dibuat semi terbuka yang memberi pilihan jawaban pada responden dan memberi pilihan jawaban pada responden dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh peneliti.

1. Kuesioner (angket) adalah suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti, yang bertujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan informasi yang relevan, serta informasi yang dibutuhkan dapat dibutuhkan secara serentak. Dalam penelitian ini angket digunakan sebagai alat pendamping dalam mengumpulkan data. Daftar pertanyaan dibuat semi terbuka yang memberi

pilihan jawaban pada responden dan memberi pilihan jawaban pada responden dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh peneliti.

2. Data sekunder, untuk melihat perkembangan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dan Sumatera Utara.

3.7 Teknik Analisis Tujuan Penelitian

3.7.1 Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

3.7.2 Metode Analisa Faktor

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS). PLS merupakan model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan berdasarkan variance atau component-based structural equation modeling. Menurut Ghozali & Latan (2015), tujuan PLS-SEM adalah untuk mengembangkan teori atau membangun teori (orientasi prediksi). PLS digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten (prediction). PLS merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak mengasumsikan data arus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sample kecil

(Ghozali, 2011). Penelitian ini memiliki model yang kompleks serta jumlah sampel yang terbatas, sehingga dalam analisis data menggunakan software SmartPLS. SmartPLS menggunakan metode bootstrapping atau pengandaan secara acak. Oleh karenanya asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah. Selain itu, dengan dilakukannya bootstrapping maka SmartPLS tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel, sehingga dapat diterapkan untuk penelitian dengan jumlah sampel kecil. Analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (measurement model) atau outer model dan model struktural (structural model) atau inner model.

1. Uji Statistik Deskriptif Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2016).
2. Uji Model Pengukuran atau Outer Model Model pengukuran atau outer model menunjukkan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. valuasi model pengukuran melalui analisis faktor konfirmatori adalah dengan menggunakan pendekatan MTMM (MultiTrait-MultiMethod) dengan menguji validity convergent dan discriminant. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (Ghozali & Latan, 2015).
 - a. Convergent Validity

Convergent validity dari model pengukuran dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi antara item score/indikator dengan score konstraknya. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima (Ghozali & Latan, 2015).

b. Discriminant Validity

Discriminant validity indikator dapat dilihat pada cross loading antara indikator dengan konstraknya. Apabila korelasi konstruk dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator dengan konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya. Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari average variance extracted (\sqrt{AVE}) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dengan model. Model dikatakan mempunyai discriminant validity yang cukup baik jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya (Fornell & Larcker, 1981 dalam Ghozali, 2011). Dalam Ghozali & Latan (2015) menjelaskan uji lainnya untuk menilai validitas dari konstruk dengan melihat nilai AVE. Model dikatakan baik apabila AVE masing-masing konstruk nilainya lebih besar dari 0,50.

c. Reliability

Selain uji validitas, pengukuran model juga dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program SmartPLS 3.0, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Konstruk dinyatakan reliable jika nilai composite reliability maupun cronbach alpha di atas 0,70 (Ghozali & Latan, 2015).

3. Uji Model Struktural atau Inner

Model Model struktural atau inner model menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk berdasarkan pada substantive theory.

a. R-Square

Dalam menilai model struktural terlebih dahulu menilai RSquare untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji goodness-fit model. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai RSquare 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah (Ghozali & Latan, 2015).

b. F-Square

Uji f-square ini dilakukan untuk mengetahui kebaikan model. Nilai fsquare sebesar 0,02, 0,15 dan 0,35 dapat diinterpretasikan apakah prediktor variabel laten mempunyai pengaruh yang lemah, medium, atau besar pada tingkat struktural (Ghozali, 2011).

c. Estimate For Path Coefficients

Uji selanjutnya adalah melihat signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi T statistik yaitu melalui metode bootstrapping (Ghozali & Latan, 2015).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Langkat

4.1.1 Kondisi Geografi

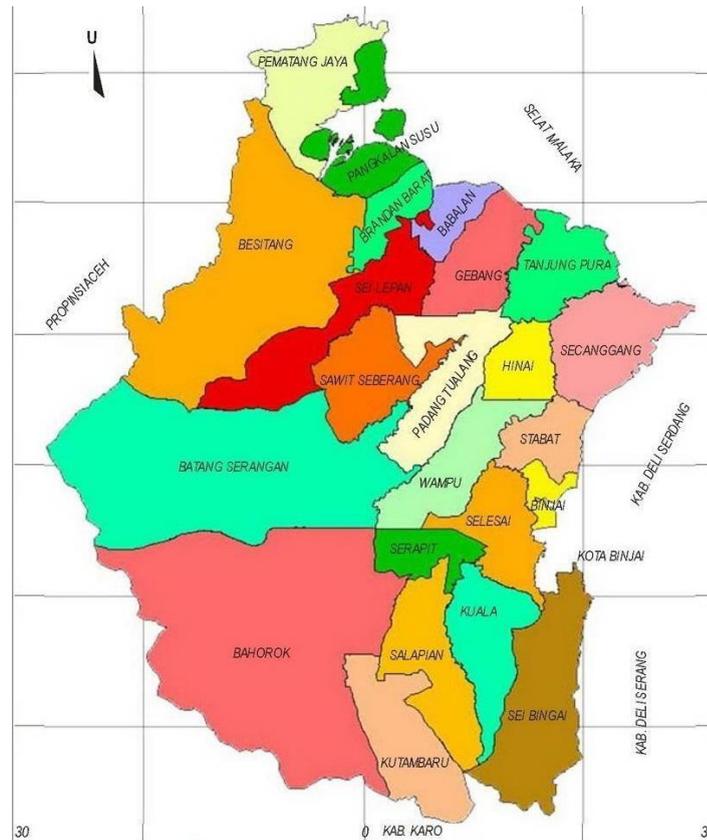
Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3°14'00"- 4°13'00" Lintang Utara, 97°52'00' – 98° 45'00" Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29 Km² (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif.

Area Kabupaten Langkat memiliki batas-batas wilayah antara lain:

- Utara : berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka
- Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Karo
- Barat : berbatasan dengan Provinsi Aceh
- Timur : berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai

Seperti daerah- daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Langkat termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

Iklim di wilayah Kabupaten Langkat termasuk tropis dengan indikator iklim sebagai berikut : Musim Kemarau (Februari s/d Agustus); Musim Hujan (September s/d Januari). Curah hujan rata-rata 2.205,43 mm/tahun dengan suhu rata-rata 28 derajat celcius - 30 derajat celcius.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat menempati area seluas ±6.263,29 Km² yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 desa serta 37 Kelurahan Definitif. Berdasarkan luas daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Langkat, luas daerah terbesar adalah Kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 Km² atau 17,59%. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Binjai dengan luas 42,05 km² atau 0,67%.

4.1.2 Kondisi Pemerintah

Kabupaten Langkat memiliki 23 Kecamatan dan 277 Desa dimana kecamatan luas daerah terbesar adalah kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 km² atau 17,59 persen diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 km² atau 14,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai dengan luas 42,05 km² atau 0,67 persen dari total luas wilayah Kabupaten Langkat.

Sedangkan Jumlah desa yang terbanyak berasal dari kecamatan Bahorok dan Tanjung Pura dengan jumlah 19 desa diikuti kecamatan Salapian dan Secanggang dengan jumlah 17 desa. Sedangkan desa yang memiliki jumlah desa terendah yaitu Binjai dengan jumlah 5 desa.

Tabel 4.1

Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Lagkat

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa	Ibukota Kecamatan
1	Bahorok	1 101,83	19	Pekan Bahorok
2	Serapit	98,50	10	Serapit
3	Salapian	221,73	17	Minta Kasih
4	Kutambaru	236,84	8	Kutambaru
5	Sei. Bingei	333,17	16	Namu Ukur
6	Kuala	206,23	16	Pekan Kuala
7	Selesai	167,73	14	Pekan Selesai
8	Binjai	42,05	7	Kwala Begumit
9	Stabat	108,85	12	Stabat Baru
10	Wampu	194,21	14	Bingai
11	Batang Serangan	899,38	8	Batang Serangan
12	Sawit Seberang	209,10	7	Sawit Seberang
13	Padang Tualang	221,14	12	Tanjung Selamat
14	Hinai	105,26	13	Tanjung Beringin
15	Secanggang	231,19	17	Hinai Kiri
16	Tanjung Pura	179,61	19	Pekan Tanjung
17	Gebang	178,49	11	Pekan Gebang
18	Babalan	76,41	8	Pelawi Utara
19	Sei. Lapan	280,68	14	Alur Dua
20	Brandan Barat	89,80	7	Tangkahan Durian

21	Besitang	720,74	9	Pekan Besitang
22	Pangkalan Susu	151,35	11	Pangkalan Susu
23	Pematang Jaya	209,00	8	Pematang Jaya
	Jumlah	6263,29	277	

Sumber: BPS Kabupaten Langkat

4.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat tahun 2020 mengalami penurunan dimana dari hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 1.041.775 jiwa menurun menjadi 1.030.202 pada tahun 2020. Jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 520.784 jiwa dan perempuan sebanyak 509.418 jiwa.

Komposisi penduduk dibagi dalam tiga kelompok umur, yaitu:

- Kelompok umur 0 – 14 tahun sebanyak 262.989 jiwa (25,52%)
- Kelompok umur 15 – 64 tahun sebanyak 716.230 jiwa (69,52%).
- Kelompok umur 64 tahun ke atas sebanyak 50.983 jiwa (4,94%).

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk		
	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Bahorok	20.955	20.615	41.570
Sirapit	8.468	8.235	16.703
Salapian	13.195	13.043	26.238
Kutambaru	7.088	7.021	14.109
Sei Bingai	25.442	26.175	51.617
Kuala	20.007	20.320	40.327
Selesai	36.722	35.873	72.595
Binjai	23.828	23.190	47.018
Stabat	45.715	45.438	91.153
Wampu	21.505	20.883	42.388
Batang Serangan	18.179	17.585	35.764
Sawit Seberang	13.038	12.727	25.765
Padang Tualang	26.975	25.920	52.895
Hinai	26.809	25.855	52.664

Secanggang	35.905	34.577	70.482
Tanjung Pura	34.936	34.082	69.018
Gebang	24.170	23.339	47.509
Babalan	28.538	28.168	56.706
Sei Lapan	25.219	24.411	49.630
Brandan Barat	12.417	11.606	24.023
Besitang	22.985	22.301	45.286
Pangkalan Susu	22.170	21.703	43.873
Pematang Jaya	6.518	6.351	12.869
Langkat	520.784	509.418	1.030.202

Sumber: BPS Kabupaten Langkat

Dapat kita lihat pada Tabel 1.2 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Langkat adalah Kecamatan Stabat dimana jumlah penduduknya sebesar 91.153 jiwa dan disusul oleh Kecamatan Selesai dengan jumlah Penduduk 72.595 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Langkat yaitu Kecamatan Pematang jaya dengan jumlah 12.869 jiwa.

Tabel 4.3
Realisasi Pendapatan Kabupaten Langkat 2019-2021

Kegiatan	2019	2020	2021
Anggaran Pendapatan (Milyar Rp)	2 361,51	2 000,79	1 904,96
PAD (Milyar Rp)	167,52	168,84	120,3
Pendaoatan Transfer (Milyar Rp)	1 868,44	1 623,32	1 736,32
Bagi Hasil Pajak	141,67	113,13	146,74
Bagi Hasil Bukan Pajak	8,28	6,14	6,19
DAU (Milyar Rp)	1 229,43	1 099,66	1 081,98
DAK (milyar Rp)	353,47	319,00	207,51
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Milyar Rp)	325,55	208,62	48,35

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka (www.bps.co.id)

Menurut Tabel 4.3 diatas pada tahun 2021, realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Langkat mencapai 1.904,96 milyar rupiah atau menurun sebesar 4,79% dibanding tahun 2020. Sebagian besar anggaran pendapatan

Kabupaten Langkat berasal dari pendapatan transfer yaitu sebesar 1.736,32 milyar rupiah (91,15%). Sebagian besar pendapatan transfer berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), selebihnya dari Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Anggaran belanja pemerintah Kabupaten Langkat mencapai 1.901,96 milyar rupiah terdiri dari belanja operasi sebesar 76,62% dan belanja modal sebesar 5,27%, sisanya transfer bantuan keuangan. Stabat merupakan kecamatan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah Otonom terkecil pada tahun 2021 di Kabupaten Langkat sebesar Rp1.753.248.416,00 atau 71,56%.

4.1.4 Kondisi Sosial

1. Pendidikan

Upaya pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Langkat terus dilakukan baik dengan penyediaan/peningkatan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru PNS dan guru honorer yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah setiap tingkatan pendidikan maupun mutu/kualitasnya.

Tabel 4.4

APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Langkat Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2020	2021	2020	2021
SD/MI/Sederajat	98,64	99,74	110,83	110,41
SMP/MTs/Sederajat	78,97	81,65	90,17	88,47
SMA/SMK/MA/Sederajat	65,31	77,98	102,91	101,43
Perguruan Tinggi	8,96	9,69	7,94	6,91

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Menurut Tabel 4.4 jenjang pendidikan pada tahun 2021, Angka Partisiparsi

Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD adalah sebesar 99,74% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 110,41% untuk jenjang SMP Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 81,65% dan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu 88,47%. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK sebesar 77,98% untuk Angka Partisipasi Murni (APM) dan 101,43% untuk Angka Partisipasi Kasar (APK). Untuk perguruan tinggi, Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 9,69% dan untuk Angka Partisipasi Kasar yaitu 6,91%. Pada tahun 2021, angka buta huruf paling tinggi padakelompok umur 65 tahun ke atas yaitu sebanyak 7,99%.

2. Kesehatan

Tabel 4.5

Statistik Tenaga Kesehatan Kabupaten Langkat

Uraian	2019	2020	2021
Dokter	40,27	49,76	43,78
Bidan/perawat/tenaga kesehatan lainnya	59,73	50,24	55,7
Dukun	0,00	0,00	0,53
Angka Harapan Hidup	68,59	68,80	68,97
Angka Kesakitan (%)	12,06	14,62	9,12

Sumber: Statkesra Provinsi Sumatera Utara 2021 dan IPM 2021 (www.bps.go.id)

Dapat dilihat pada Tabel 4.5 diatas persentase tertinggi penolong kelahiran di Kabupaten Langkat dilakukan oleh Bidan dan tenaga kesehatan lainnya yakni mencapai 55,7%, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Sementara itu, balita yang proses kelahirannya ditolong oleh dokter mencapai 43,78% menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Infrastruktur Jalan

Hubungan darat antar kecamatan dapat melalui jalur jalan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Langkat terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan

prasarana khususnya yang menjadi penghubung antar kecamatan maupun desa. Banyak hutan yang dimanfaatkan untuk pembukaan jalan baru sehingga memudahkan transportasi dari desa ke ibukota kecamatan. Pada tahun 2021, panjang jalan mencapai 1.561.3 km dengan kondisi baik sampai rusak berat dan permukaan yang di aspal sampai berupa tanah.

Tabel 4.6
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Langkat (km)
2019-2021

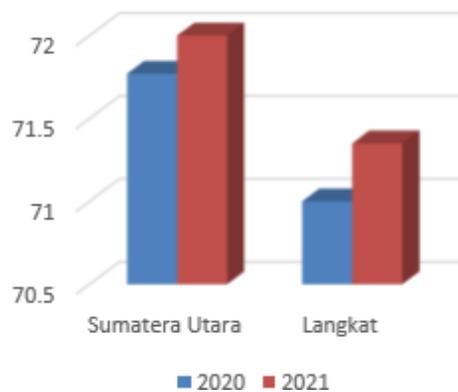
Kondisi Jalan	2019	2020	2021
Baik	388 850	811 560	657 772
Sedang	393 440	54 000	273 445
Rusak	698 350	1 200	451 264
Rusak Berat	80 670	694 540	178 869
Jumlah	1 561 300	1 561 300	1 561 300

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Dilihat dari Tabel 4.6 di atas jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar dan mendorong kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain. Dilihat dari kondisinya, jalan di Kabupaten Langkat pada tahun 2021 mayoritas dalam kondisi rusak dengan panjang jalan 451.264 km dan jalan dengan kondisi baik sepanjang 657.772 km.

4. Pembangunan Manusia

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.



Gambar 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Langkat 2020-2021

Pada gambar 4.2 diatas selama periode tahun 2020-2021 angka IPM Kabupaten Langkat meningkat yakni tahun 2020 sebesar 71,00 naik menjadi 71,35 pada tahun 2021. Angka IPM ini sudah berada pada kriteria tinggi, namun pemerintah harus tetap memberi perhatian terhadap pembangunan manusianya agar produktivitas masyarakat semakin meningkat dan bermanfaat bagi modal pembangunan dan bukan menjadi beban pembangunan. IPM Kabupaten Langkat menduduki peringkat ke 16 dari 25 Kabupaten dan 8 kota di Provinsi Sumatera Utara.

5. Kemiskinan

Tabel 4.7

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Langkat

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	103 080	101 870	106 590
Penduduk Miskin (%)	9,91	9,73	10,12
IPM	70,76	71,00	71,35

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Berdasarkan Tabel 4.7 penduduk miskin di Kabupaten Langkat pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 9,73%

pada tahun 2020 naik menjadi 10,12% pada tahun 2021.

4.1.5 Kondisi Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat mengalami peningkatan sebesar 3,08%. Tingkat produktivitas nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Langkat menduduki peringkat ketiga di provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.8

Jumlah Nilai Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Langkat

Produk Domestik Regional Bruto	Tahun		
	2019	2020	2021
PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha	42.515,18	43.208,00	46.301,20
Laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran	5,07	-	3,08
Distribusi PDRB atas harga berlaku menurut pengeluaran	100,00	100,00	100,00
PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut pengeluaran	29.597.772,36	29.343.355,98	30.247.338,87
PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran	42.515.176,42	43.207.997,58	46.301.203,75
Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan	5,07	-	3,08
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha	100,00	100,00	100,00
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha	29.597,77	29.343,26	30.247,39
Laju Implisit PDRB menurut pengeluaran	2,51	1,50	2,51
Pertumbuhan Ekonomi	5,02	5,07	-0.86
Laju indeks implisit PDRB menurut lapangan usaha	-	-	-
Indeks implisit PDRB menurut lapangan usaha	143,64	-	-
Indeks perkembangan PDRB seri 2010 ADHB menurut lapangan usaha	291,58	-	-

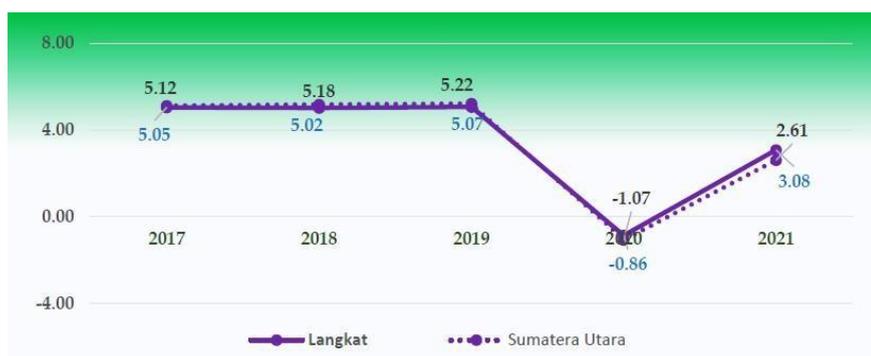
Indeks perkembangan PDRB seri 2010 ADHK menurut lapangan usaha	181,39	-	-
---	---------------	---	---

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Menurut Tabel 4.8 diatas pada tahun 2021 PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Langkat sebesar 46.301,20 milyar rupiah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 43.208,00 milyar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Langkat sebesar 30.247.338,87 milyar rupiah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 29.343.255,98 milyar rupiah. Kondisi perekonomian Kabupaten Langkat menunjukkan pergerakan menurun dari 5,07% pada tahun 2019 menjadi -0,86% pada tahun 2020.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Langkat pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, laju pertumbuhan PDRB Langkat tahun 2021 sebesar 3,08% sedangkan pada tahun 2020 sebesar -0,86%. Ada 4 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif dari 17 lapangan usaha yang ada. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi negatif tertinggi yaitu sebesar -0,55%, disusul dengan lapangan usaha jasa perusahaan dengan pertumbuhan sebesar -0,15%. Sedangkan 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan yang positif tertinggi adalah informasi dan komunikasi sebesar 5,39%, pengadaan air dan pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,42% serta pertambangan dan penggalan sebesar 4,18%.



Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Langkat dan PDRB Sumatera Utara, 2017-2021 (%)

Dilihat dari gambar 4.3 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat mengalami perubahan pola pertumbuhan yang berbeda dengan Sumatera Utara yaitu mengalami pertumbuhan yang melambat dari tahun 2017 ke tahun 2018, mengalami akselerasi pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kontraksi, sepanjang tahun 2017 sampai 2019, pertumbuhan ekonomi Langkat berada di atas Sumatera Utara. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Langkat meningkat sebesar 3,08% sedangkan Sumatera Utara meningkat sebesar 2,61%.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita Kabupaten Langkat sebesar 43% dari Kota Medan. Dari perbandingan antar Kabupaten/Kota terpilih, PDRB per kapita Kabupaten Langkat tahun 2021 sebesar 44,76 juta rupiah, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Serdang bedagai yang mencapai 45,94 juta rupiah. Berdasarkan PDRB per kapita terlihat ketimpangan yang sangat tinggi, PDRB total atas dasar harga berlaku tertinggi se Sumatera Utara tercatat di Kota Medan yang

mencapai 254.721,32 milyar rupiah pada 2021, sementara Kabupaten Langkat mencapai 46.301,2 milyar rupiah.



Gambar 4.4 PDRB per Kapita Kabupaten Langkat ADHB dan ADHK 2010, 2017-2021 (ribu rupiah)

Dapat dilihat dari gambar 4.4 PDRB per kapita Kabupaten Langkat atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 sebesar 36,01 juta rupiah dan meningkat menjadi 44,76 juta rupiah pada tahun 2021. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, sementara itu jika dilihat dari perhitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2017-2021 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2021, PDRB per kapita Langkat tumbuh sebesar 4,32%, sedangkan tahun 2021 tumbuh sebesar 2,51%.

4.2 Perkembangan Literasi dan Inklusi Keuangan

4.2.1 Perkembangan Literasi dan Inklusi Keuangan Di Indonesia

Untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, OJK melaksanakan survei nasional yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali, bermula dari tahun 2013, 2016, dan yang paling baru 2019. Survei nasional ini memberikan gambaran mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Secara umum, tingkat literasi dan inklusi

keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, artinya terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang well literate dari tahun ke tahun. Well literate merupakan kondisi dimana seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan layanan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan, sikap, dan perilaku yang benar dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, inklusi keuangan merupakan sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal.

Tabel 4.9

Indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia 2016- 2022

No	Tahun	Literasi keuangan	Inklusi Keuangan
1.	2016	29,80%	67,80%
2.	2019	38,03%	76,19%
3.	2022	-	

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.co.id)

Dapat kita lihat pada tabel 4.9 diatas indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia di tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 38,03% yang berarti dari setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 38 orang yang well literate. Hasil ini menunjukkan peningkatan dari survei sebelumnya yakni 29,7% di tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi pada inklusi keuangan yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 sebesar 76,19% sedangkan pada tahun 2016 hanya memperoleh sebesar 67,80%. Meskipun menunjukkan peningkatan, di sisi lain data ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masyarakat Indonesia yang belum

memiliki pengetahuan, keyakinan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang benar tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan jasa keuangan formal.

Tabel 4.10

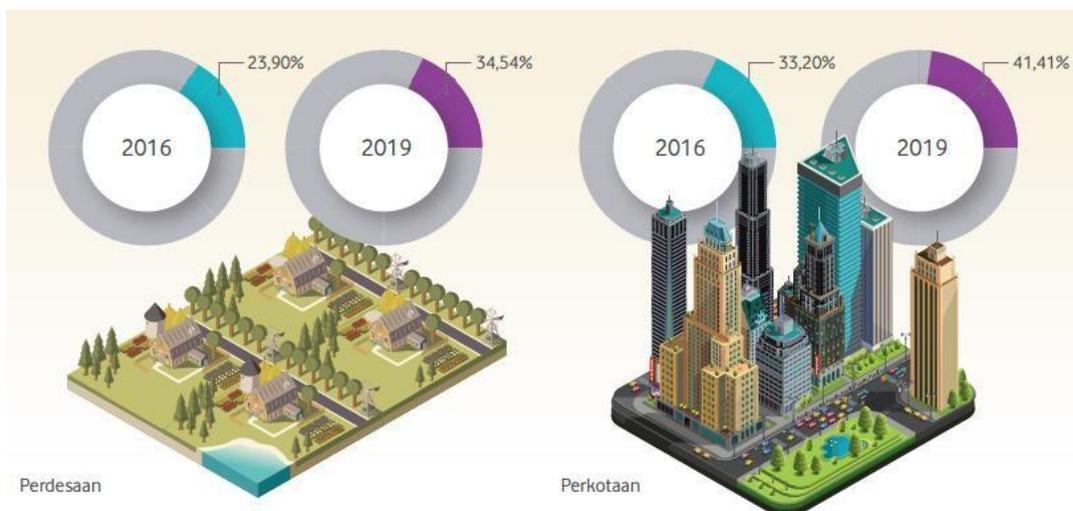
Indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia 2016- 2022 berdasarkan gender

No	Tahun	Literasi keuangan		Inklusi Keuangan	
		L	P	L	P
1.	2016	33,20%	25,50%	69,9%	66,2%
2.	2019	39,94%	36,13%	77,2%	75,2%
3.	2022	-			

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.co.id)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat kita lihat indeks literasi dan inklusi keuangan berdasarkan gender mengalami peningkatan, tingkat literasi keuangan pada laki-laki tahun 2019 memperoleh 39,94% sedangkan untuk tahun 2016 hanya memperoleh 33,20%. Begitu juga pada tingkat inklusi keuangan di tahun 2019 yakni, 75,2%, sedangkan pada tahun 2016 hanya 69,9%.

Untuk literasi keuangan pada perempuan pada tahun 2019 sama halnya dengan laki-laki yang juga mengalami peningkatan yaitu, 36,13% sedangkan pada tahun 2016 memperoleh hanya 25,50%. Begitu juga dengan inklusi keuangan berdasarkan perempuan yang pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan jumlah 75,2% di bandingkan dengan tahun 2016 yang hanya 66,2%. dapat di simpulkan bahwa dari segi literasi maupun inklusi keuangan laki-laki lebih unggul dari perempuan dalam hal pengetahuan maupun memiliki akses terhadap jasa keuangan.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.co.id)

Gambar 4.5 Indeks Literasi Keuangan Berdasarkan Strata Wilayah di Indonesia 2016-2019

Pada gambar 4.5 Hasilnya, indeks literasi keuangan berdasarkan strata wilayah perdesaan dan perkotaan mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke 2019. Pada tahun 2016 perdesaan memperoleh hanya 23,90% sedangkan untuk perkotaan memperoleh angka 33,20%. Untuk tahun 2019 masing – masing mengalami peningkatan yaitu, untuk perdesaan sebesar 34,54% sedangkan perkotaan memperoleh 41,41%.

Tabel 4.11

Persentase Literasi dan inklusi keuangan berdasarkan jenis pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Literasi Keuangan		Inklusi Keuangan
		2016	2019	2016
1.	Pengusaha/ Wiraswasta	27,70%	43,60%	66,6%
2.	Pagawai/ Profesional	39,90%	54,02%	73,9%
3.	Pelajar/ Mahasiswa	23,40%	31,69%	64,2%
4.	Ibu rumah tangga	15,30%	30,46%	61,4%
5.	Pensiunan	35,30%	54,46%	74,0%
6.	Petani/ Nelayan	0	20,75%	0
7.	Tidak bekerja	22,80%	28,40%	55,3%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.co.id)

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas tentang persentase literasi keuangan berdasarkan jenis pekerjaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Hasilnya menunjukkan peningkatan persentase literasi keuangan untuk seluruh klasifikasi jenis pekerjaan dari tahun 2016 ke 2019, dimana peningkatan tertinggi terdapat pada pensiunan meningkat 19,16% yaitu, (54,46%) dibandingkan dengan tahun 2016 hanya (35,30%). Sedangkan klasifikasi petani/nelayan pada tahun 2016 masih 0 karena belum dilakukan perhitungan pada SNLIK tahun 2016. sedangkan untuk inklusi keuangan pada tahun 2016 pensiunan tetap berada di tingkat tertinggi yaitu 74,0%.

Tabel 4.12

Persentase Literasi dan Inklusi keuangan berdasarkan tingkat usia

No	Tingkat Usia	Literasi Keuangan		Inklusi Keuangan	
		2016	2019	2016	2019
1.	15 – 17 Tahun	5,20%	15,92%	53,0%	-
2.	18 – 25 Tahun	32,10%	44,04%	70,0%	-
3.	26 – 35 Tahun	33,50%	47,98%	68,4%	-
4.	36 – 50 Tahun	30,60%	37,87%	69,5%	-
5.	> 50 Tahun	21,40%	26,13%	63,7%	-

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.co.id)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas tentang persentase literasi dan inklusi keuangan berdasarkan tingkat usia Persentase literasi keuangan berdasarkan klasifikasi usia pada tahun 2019 menunjukkan pola yang sama dengan tahun 2016, dimana kelompok usia 26 – 35 tahun memiliki persentase literasi keuangan tertinggi dari kelompok usia lainnya yaitu sebesar 47,98%, diikuti dengan kelompok usia 18 – 25 tahun 44,04%, 36 – 50 tahun 37,87%, dan di atas 50 tahun 26,13%. Kelompok usia 15 – 17 tahun memiliki persentase literasi keuangan paling rendah pada tahun 2016 dan tahun 2019 yaitu sebesar 15,92%.

Tabel 4.13**Persentase Literasi dan Inklusi keuangan berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Literasi Keuangan		Inklusi Keuangan	
		2016	2019	2016	2019
1.	< SD	3,60%	5,87%	39,6%	-
2.	SMP	9,00%	11,44%	60,0%	-
3.	SMA	11,30%	23,74%	57,4%	-
4.	D1 – D3	38,20%	52,34%	72,8%	-
5.	Lulus perguruan tinggi	67,40%	77,69%	88,0%	-

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.co.id)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas tentang persentase literasi keuangan untuk setiap tingkat pendidikan mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke 2019. Persentase yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu dari pendidikan D1-D3 karna mengalami peningkatan sebesar 14% sedangkan yang mengalami peningkatan terendah yaitu dari tingkat pendidikan SD dan SMP karena hanya mengalami peningkatan sebesar 2%.

Tabel 4.14**Persentase Literasi dan Inklusi Keuangan berdasarkan sektor jasa keuangan**

No	Tingkat Pendidikan	Literasi Keuangan		Inklusi Keuangan	
		2016	2019	2016	2019
1.	Perbankan	28,90%	36,12%	63,60%	73,88%
2.	Peransuransian	15,80%	19,40%	12,10%	13,15%
3.	Dana Pensiun	10,90%	14,13%	4,70%	6,18%
4.	Lembaga Pembiayaan	13,00%	15,17%	13,00%	15,17%
5.	Pegadaian	17,80%	17,81%	10,50%	12,38%
6.	Pasar Modal	4,40%	4,92%	1,30%	1,55%
7.	Lembaga Keuangan Mikro	0	0,85%	0	0,72%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.co.id)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas tentang persentase literasi dan inklusi keuangan berdasarkan sektor jasa keuangan menunjukkan peningkatan dari tahun 2016. Sektor dengan persentase literasi keuangan tertinggi adalah perbankan 36,12% dan yang paling rendah adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebesar

0,85%. Khusus untuk LKM, persentase literasi keuangan belum diukur pada survei tahun 2013 dan 2016.

Dilihat dari sisi produk/ layanan jasa keuangan, produk tabungan dari tahun ke tahun menjadi produk yang paling banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Pada posisi kedua hingga kelima produk/layanan jasa keuangan yang paling banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia bervariasi namun produk perbankan tetap mendominasi. Sementara itu, produk perbankan syariah dan produk/layanan baru menempati posisi 5 (lima) terbawah produk/layanan baru yang belum familiar di masyarakat.

Hal yang sama juga terjadi pada persentase inklusi keuangan yang mengalami peningkatan dari tahun 2016. Untuk produk/ layanan jasa keuangan yang menjadi produk sering di gunakan oleh masyarakat ialah perbankan dengan persentase sebesar 73,88%.

Tabel 4.15

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia per Indonesia

No	Provinsi	Literasi Keuangan		Inklusi Keuangan	
		2016	2019	2016	2019
1.	Aceh	32,7%	44,36%	73,1%	86,09%
2.	Sumatera Utara	31,3%	37,96%	75,6%	93,98%
3	Sumatera Barat	27,3%	34,55%	66,9%	66,75%
4.	Riau	29,5%	43,19%	69,5%	86,39%
5.	Jambi	26,9%	35,17%	66,9%	64,83%
6.	Sumatera Selatan	31,3%	40,05%	72,4%	85,08%
7.	Bengkulu	27,6%	34,12%	67,3%	85,56%
8.	Bangka Belitung	29,5%	30,97%	69,1%	61,94%
9.	Lampung	26,9%	35,70%	69,8%	64,57%
10.	Kepulauan Riau	31,1%	45,67%	74,5%	92,13%
11.	DKI Jakarta	40,0%	59,16%	78,2%	94,76%
12.	Jawa Barat	33,0%	37,43%	71,4%	88,48%
13.	Jawa Tengah	33,5%	47,38%	66,2%	65,71%
14.	DI Yogyakarta	38,5%	58,53%	76,7%	76,12%
15.	Jawa Timur	35,6%	48,95%	73,2%	87,96%
16.	Banten	38,2%	39,27%	69,5%	84,29%

17.	Bali	37,5%	38,06%	76,0%	92,91%
18.	Nusa Tenggara Barat	21,5%	34,65%	63,3%	62,73%
19.	Nusa Tenggara Timur	28,0%	27,82%	62,2%	60,63%
20.	Kalimantan Barat	30,50%	36,48%	65,5%	75,33%
21.	Kalimantan Tengah	26,2%	37,01%	60,4%	74,80%
22.	Kalimantan Selatan	23,3%	36,22%	59,3%	74,54%
23.	Kalimantan Timur	30,5%	39,63%	74,9%	92,39%
24.	Kalimantan Utara	26,5%	35,43%	61,5%	65,09%
25.	Sulawesi Utara	28,7%	38,85%	68,4%	83,99%
26.	Sulawesi Tengah	22,5%	39,63%	65,1%	84,51%
27.	Sulawesi Selatan	28,4%	32,46%	68,0%	86,91%
28.	Sulawesi Tenggara	26,5%	36,75%	66,9%	75,07%
29.	Gorontalo	23,3%	31,23%	62,5%	60,89%
30.	Sulawesi Barat	26,9%	34,91%	65,5%	62,99%
31.	Maluku	26,2%	36,48%	64,0%	65,62%
32.	Maluku Utara	27,3%	37,53%	64,0%	75,85%
33.	Papua Barat	19,3%	28,87%	58,5%	59,84%
34.	Papua	22,2%	29,13%	61,5%	60,89%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.co.id)

Berdasarkan tabel 4.15 diatas tentang indeks literasi dan inklusi di Indonesia per Provinsi terlihat bahwa terdapat ketimpangan yang cukup tinggi antara indeks literasi keuangan di setiap provinsi, dimana provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi adalah DKI Jakarta 59,16% dan yang paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur 27,82%. Terdapat 13 provinsi yang memiliki indeks literasi keuangan di atas indeks literasi nasional 38,03% diantaranya Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, sedangkan 21 provinsi lainnya berada di bawah indeks literasi keuangan nasional.

Sedangkan untuk persentase inklusi keuangan Indonesia per Provinsi yang paling tinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta yang mencapai sebesar 94,76%, namun untuk peningkatan tertinggi yaitu pada Provinsi Sumatera Utara yang

mengalami peningkatan sebesar 18%, dengan mencapai nominal 93,88% pada tahun 2019.

4.2.2 Perkembangan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sumatera Utara

Tabel 4.16

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Sumatera Utara tahun 2016 - 2022

No	Tahun	Literasi keuangan	Inklusi Keuangan
1.	2016	31,3%	75,6%
2.	2019	37,96%	93,98%
3.	2022	-	-

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.co.id)

Berdasarkan tabel 4.16 di atas indeks literasi keuangan nasional tahun 2016 menurut survei OJK sebesar 29.66 % mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar 21.84 %. Secara sektoral perbankan yang tertinggi sebesar 28.94% dan terendah pasar modal sebesar 4.40%. Masyarakat Indonesia hanya 36.02% yang memiliki kemampuan menghitung bunga, angsuran, hasil investasi, biaya penggunaan produk, denda dan inflasi. Untuk indeks literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Utara sendiri mengalami peningkatan indeks literasi keuangan di tahun 2019 sebesar 37,96% lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 31,3%. Survei OJK tahun 2019 menunjukkan indeks inklusi keuangan sebesar 93,98% mengalami peningkatan dimana ditahun 2016 sebesar 75,6%. Indeks Inklusi Keuangan untuk provinsi Sumatera Utara sebesar 93,98% lebih tinggi dari pada nasional. Ini menunjukan Sumatera Utara secara keseluruhan memiliki tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan yang lebih baik daripada provinsi yang lain. Pemahaman dan praktek keuangan telah berjalan baik dan masih bisa ditingkatkan lagi.

4.3 Analisa Faktor

4.3.1 Analisa faktor dan analisis persepsi masyarakat terhadap aksesibilitas lembaga keuangan, dan literasi keuangan di wilayah pesisir Kabupaten Langkat.

1. Deskripsi Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian pada masyarakat dewasa yang tertarik terhadap aksesibilitas lembaga keuangan di desa pesisir Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.

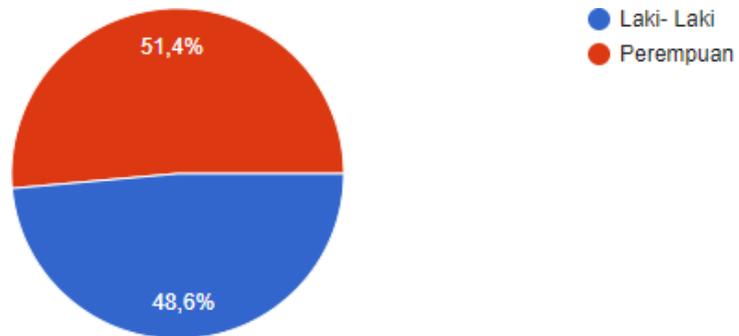
Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti akan mengemukakan terlebih dahulu tentang gambaran karakteristik responden yang dijadikan sample pada penelitian ini yang meliputi Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Rata- Rata Pendapatan. Berdasarkan tanggapan responden dari data kuisisioner yang terkumpul, maka hasil dari identifikasi karakteristik responden ialah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Karakteristik Responden

Variabel	Klasifikasi	Jumlah Responden	
		Nominal	(%)
Jumlah Kuisisioner	Disebar	35	100%
	Tidak kembali	0	0%
	Tidak dapat diolah	0	0%
	Dapat diolah	35	100%

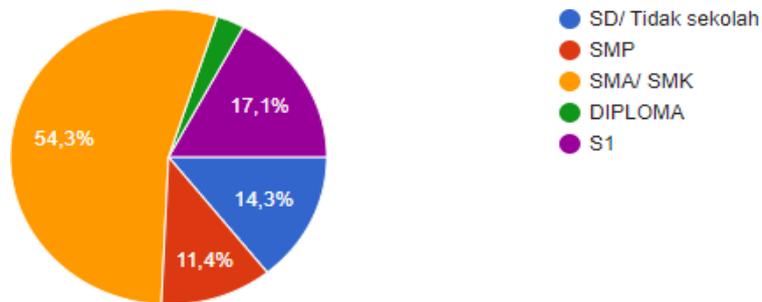
Data penelitian diperoleh dari hasil kuisioner yang telah disebarakan kepada seluruh responden yang berjumlah 40 orang. Hasil kuisioner dapat dilihat pada Gambar Grafik dibawah ini:

2. Data Identitas Responden



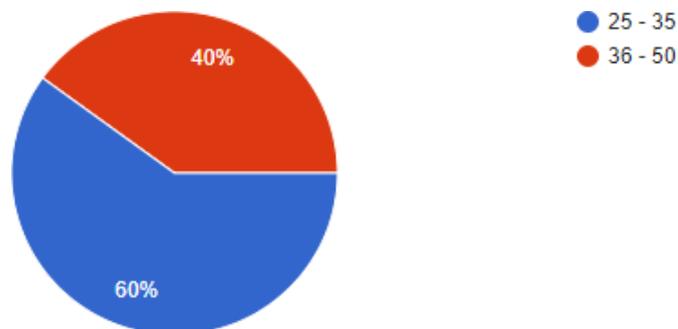
Gambar 4.6 Jenis Kelamin

Dari data di atas menunjukkan bahwasanya dari 35 responden pada masyarakat dewasa yang tertarik terhadap aksesibilitas lembaga keuangan di desa pesisir Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang berjenis kelamin Laki-laki ada sebanyak 17 responden, dan responden yang berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 18 responden dari jumlah responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat dewasa yang tertarik terhadap akses lembaga keuangan didominasi oleh Jenis Kelamin perempuan dengan persentase sebanyak 51,4% dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 48,6%.



Gambar 4.7 Pendidikan Terakhir

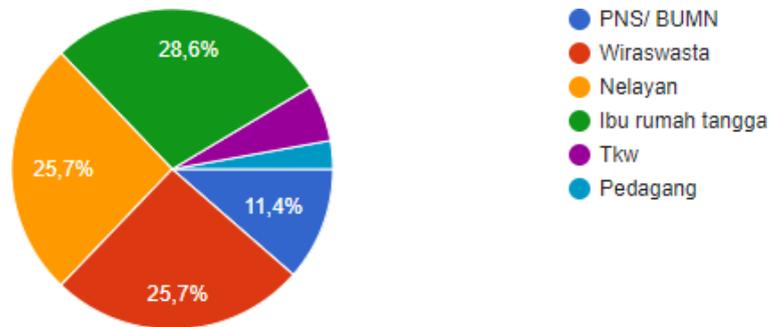
Berdasarkan dari gambar diatas pendidikan terakhir pada penelitian ini di dominasi dengan responden yang berpendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 54,3%, diikuti dengan terbanyak ke duayaitu pendidikan strata-1 sebanyak 17,1% dan pendidikan terakhir SD atau tidak bersekolah sebanyak 14,3%, selain tiga katagori tersebut terdapat pendidikan SMP sebanyak 11,4% sedangkan pendidikan terakhir Diploma.



Gambar 4.8 Tingkat Usia

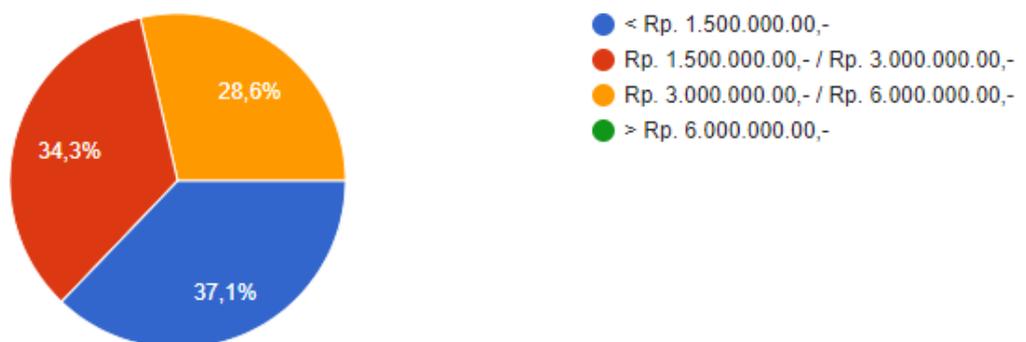
Pada penelitian ini terdapat responden sebanyak 35 responden. Berdasarkan pada pertanyaan Usia yang terbagi menjadi dua kategori yaitu 25 tahun – 35 tahun dan 36 tahun -50 tahun. Responden yang memiliki usia 25 tahun – 35 tahun sebanyak 60%, dan responden yang memiliki usia 36 tahun – 50 tahun

sebesar 40% yang dimana penelitian kali ini di dominasi oleh usia 25 tahun – 35 tahun.



Gambar 4.9 Jenis Pekerjaan

Pada penelitian kali ini pada kategori jenis pekerjaan terdapat pilihan terbanyak adalah jenis pekerjaan ibu rumah tangga sebesar 28,6%, kemudian untuk jenis pekerjaan wiraswasta dan nelayan memperoleh nilai yang sama sebesar 25,7%, lalu tiga kategori yang lain yaitu, PNS/BUMN sebanyak 11,4%, dan pedagang dan tkw masuk dalam kategori terkecil. maka dari itu penelitian kali ini di dominasi oleh jenis pekerjaan ibu rumah tangga.



Gambar 4.10 Rata-rata Pendapatan

Gambar diatas adalah jumlah rata-rata pendapatan responden yang sudah di kumpulkan, rata- rata pendapatan tertinggi yang di peroleh responden yaitu pada kategori < Rp. 1.500.000,- sebanyak 37,1%, lalu yang terbanyak kedua yaitu kategori Rp. 1.500.000,- / Rp. 3.000.000,- sebanyak 35,3%, untuk kategori terakhir yaitu, Rp. 3.000.000,- / Rp. 6.000.000,- sebesar 28,6% , sedangkan untuk kategori pendapatan > Rp. 6.000.000,- tidak ada yang memperoleh dengan jumlah nominal tersebut.

4.3.2 Hasil Penelitian Analisis SEM-PLS

1. Convergent Validity

Convergent validity adalah salah satu dari pengukuran model pada indikator yang bersifat reflektif. Dimana dilihat dari skor butir pertanyaan dengan skor kontruknya atau melalui *loading factor* pada masing-masing indikator konstruk. Adapun parameter dalam menetapkan bahwa nilai *convergent validity* layak/terpenuhi dapat dilakukan dengan melihat nilai *rule of thumb*, dimana nilai *loading factor* lebih besar dari 0,60 – 0,70, namun dapat juga diterima rentang *loading factor* lebih besar dari 0,50 – 0,60 (Ghozali dan Latan, ali dan Latan, 2012:74). Berdasarkan hasil analisis data pada *convergent validity* pada indikator-indikator pada masing-masing variabel, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Convergent Validity Pada Aksesibilitas Lembaga Keuangan

Dalam Indikator konstruk pada variabel Aksesibilitas Lembaga Keuangan berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.18

***Convergent Validity* Aksesibilitas Lembaga Keuangan**

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
Y_A1	0,698	0,70	Tidak Memenuhi
Y_A2	0,747	0,70	Memenuhi
Y_A3	0,855	0,70	Memenuhi
Y_A4	0,865	0,70	Memenuhi
Y_A5	0,725	0,70	Memenuhi
Y_A6	0,856	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable Aksesibilitas Lembaga Keuangan dengan 6 indikator pertanyaan terdapat 1 indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, dengan nilai loading faktor $0,698 <$ dari nilai *Rule of Thumb* 0,70.

1. *Convergent Validity* Pada Pendapatan

Dalam Indikator konstruk pada variabel Pendapatan berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini

Tabel 4.19

***Convergent Validity* Pada Pendapatan**

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
X1_P1	0,528	0,70	Tidak Memenuhi
X1_P2	0,692	0,70	Tidak Memenuhi
X1_P3	0,764	0,70	Memenuhi
X1_P4	0,829	0,70	Memenuhi
X1_P5	0,769	0,70	Memenuhi
X1_P6	0,749	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable Pendapatan dengan 6 indikator pertanyaan terdapat 2 indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, dengan nilai loading faktor X1.P1 0,528< dari nilai Rule of Thumb 0,70 dan X1.P2 0,692< dari nilai *Rule of Thumb* 0,70.

2. *Convergent Validity* Pada Pendidikan

Dalam indikator konstruk pada variabel Pendidikan berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.20

Convergent Validity Pendidikan

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
X2_P1	0,760	0,70	Memenuhi
X2_P2	0,673	0,70	Tidak Memenuhi
X2_P3	0,880	0,70	Memenuhi
X2_P4	0,693	0,70	Tidak Memenuhi
X2_P5	0,844	0,70	Memenuhi
X2_P6	0,805	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable Pendidikan dengan 6 indikator pertanyaan terdapat 2 indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, dengan nilai loading faktor masing-masing 0,673;0,695< dari nilai *Rule of Thumb* 0,70.

3. *Convergent Validity* Pada Informasi

Dalam indikator konstruk pada variabel Informasi berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.21

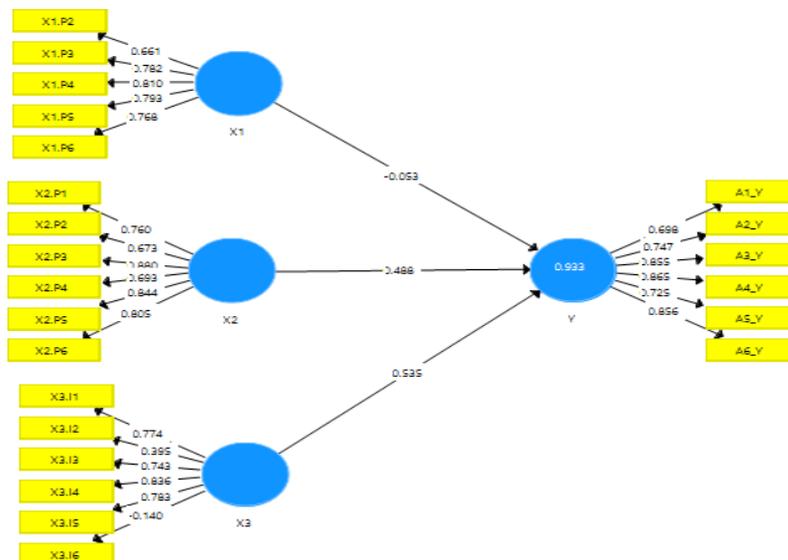
Convergent Validity Informasi

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
X3_I1	0,774	0,70	Memenuhi
X3_I2	0,395	0,70	Tidak Memenuhi
X3_I3	0,743	0,70	Memenuhi
X3_I4	0,836	0,70	Memenuhi
X3_I5	0,783	0,70	Memenuhi
X3_I6	-0.140	0,70	Tidak Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable Informasi dengan 6 indikator pertanyaan terdapat 2 indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, dengan nilai masing-masing loading faktor 0,395;- 0,140 < dari nilai *Rule of Thumb* 0,70.

Adapun hasil evaluasi model pengukuran pada masing-masing indikator konstruk dari Convergent Validity melalui loading factor dapat juga dikemukakan pada gambar dibawah ini:

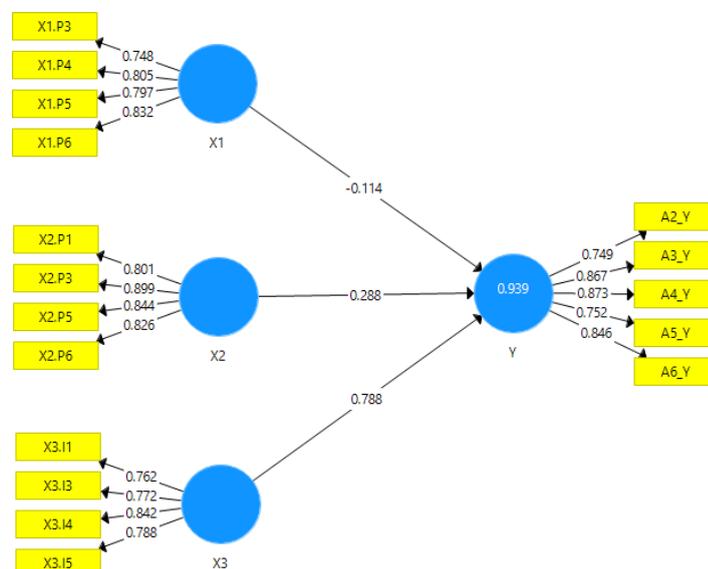


Sumber: Data Hasil Olahan PLS

Gambar 4.11 First Outer Loading

Berdasarkan tabel *Convergent Validity* indikator konstruk pada masing-masing variable, dapat dikemukakan bahwa untuk indikator konstruk pada variable Aksesibilitas Lembaga Keuangan yang tidak memenuhi nilai Loading Factor pada Y-A1. Pada variable Pendapatan yang tidak memenuhi nilai Loading Factor pada X1-P1, X1-P2, Pada variable Pendidikan yang tidak memenuhi nilai Loading Factor ada pada X2-P2, X2-P4. Dan Pada variable Informasi yang tidak memenuhi nilai Loading Factor pada X3-I2,X3-I6.

Ketentuan dalam analisis *convergent validity*, jika nilai loading factor tidak terpenuhi maka indikator konstruk dibuang dan dilakukan analisis *convergent validity* kembali, yang nantinya hasil analisis dapat terpenuhi pada tahap kedua pada indikator konstruk masing-masing variable seperti pada gambar dibawah ini:



Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS

Gambar 4.12 Second Outer Loading

1. *Convergent Validity* Pada Aksesibilitas Lembaga Keuangan

Dalam Indikator konstruk pada variabel Aksesibilitas Lembaga Keuangan berjumlah 5 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.22

Convergent Validity Aksesibilitas Lembaga Keuangan

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
Y_A2	0,749	0,70	Memenuhi
Y_A3	0,867	0,70	Memenuhi
Y_A4	0,873	0,70	Memenuhi
Y_A5	0,752	0,70	Memenuhi
Y_A6	0,846	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable Aksesibilitas Lembaga Keuangan dengan 5 indikator pertanyaan tidak terdapat indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, semua sesuai dengan nilai loading faktor masing-masing bearada diatas dari nilai *Rule of Thumb* 0,70.

1) *Convergent Validity* Pada Pendapatan

Dalam Indikator konstruk pada variabel Pendapatan tentang Bank Syariah berjumlah 4 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini

Tabel 4.23

Convergent Validity Pendapatan

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
X1_P3	0,748	0,70	Memenuhi

X1_P4	0,805	0,70	Memenuhi
X1_P5	0,792	0,70	Memenuhi
X1_P6	0,832	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable Pendapatan dengan 4 indikator pertanyaan tidak terdapat indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria semua sesuai dengan nilai loading faktor masing-masing berada diatas dari nilai Rule of Thumb 0,70.

2) *Convergent Validity* Pada Pendidikan

Dalam indikator konstruk pada variabel Pendidikan berjumlah 4 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.24

Convergent Validity Pendidikan

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
X2_P1	0,801	0,70	Memenuhi
X2_P3	0,899	0,70	Memenuhi
X2_P5	0,844	0,70	Memenuhi
X2_P6	0,826	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable Pendidikan dengan 4 indikator pertanyaan Tidak terdapat indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, semua sesuai dengan nilai loading faktor masing-masing berada diatas dari nilai Rule of Thumb 0,70.

3) *Convergent Validity* Pada Informasi

Dalam indikator konstruk pada variabel Informasi berjumlah 4 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.25

Convergent Validity Informasi

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
X3_I1	0,762	0,70	Memenuhi
X3_I3	0,772	0,70	Memenuhi
X3_I4	0,842	0,70	Memenuhi
X3_I5	0,788	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable Informasi dengan 4 indikator pertanyaan Tidak terdapat indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, semua sesuai dengan nilai loading faktor masing-masing bearada diatas dari nilai Rule of Thumb 0,70.

2. *Discriminante Validity*

Dalam analisis *discriminant validity* dimana model pengukuran pada masing-masing indikator konstruk bersifat reflektif dilakukan dengan cara melihat nilai *cross loading* pada masing-masing variabel. Dalam pengujian *discriminant validity* menggunakan *Average Variance Extracted* (AVE). adapun parameter *cross loading* dalam menilai nilai *average variance extracted* untuk mengetahui tingkat validitas dari masing-masing indiaktor konstruk pada setiap variable direkomendasikan lebih besar dari 0,50 ($> 0,50$) (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Hasil analisis *discriminant validity* dapat dikemukakan pada table di bawah ini :

Tabel 4.26

Discriminante Validity Pada Avarage Extracted (AVE)

Variabel	Nilai
Aksesibilitas Lembaga Keuangan	0,671
Pendapatan	0,634
Pendidikan	0,711
Informasi	0.626

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan hasil running data Tabel 4.26 memperlihatkan nilai *average variance extracted* pada masing-masing variable Aksesibilitas Lembaga Keuangan ,variabel Pendapatan, Pendidikan dan Informasi telah memenuhi kriteria dalam *discriminant validity*, hal ini dinilai dari *average variance extracted (AVE)* yang lebih besar dari pada 0,50 ($> 0,50$).

3. Composite Reliability

Dalam melakukan uji reliabilitas yang bertujuan untuk membuktikan seberapa akurat, konsistensi dan ketepatan instrument didalam mengukur suatu konstruk. Penggunaan *composite reliability* bertujuan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Selain itu, untuk melakukan penilain terhadap *composite reliability* melalui *rule of thumb*, dimana nilai *composite reliability* harus lebih besar dari 0,70 ($> 0,70$). Dalam menguji nilai reliabilitas pada setiap konstruk dapat dilakukan dengan menggunakan *Cronbach's Alpha*, ketentuan dari penilaian ini dilakukan melalui *rule of thumb*, dimana nilai *Cronbach's Alpha* harus lebih besar dari 0,70 ($> 0,70$). Hasil dari analisis data memperlihatkan sebagai berikut :

Tabel 4.27

Composite Reliability

Variabel	Nilai	Keterangan
Aksesibilitas Lemabaga Keuangan	0,874	Reliabel
Pendapatan	0,908	Reliabel
Pendidikan	0,870	Reliabel
Informasi	0.910	Reliabel

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai *composite reliability* pada variabel Aksesibilitas Lembaga Keuangan, Pendapatan, Pendidikan dan Informasi masing-masing menunjukkan nilai sebesar 0,874 ; 0,908; 0,870 dan 0,910. Seluruh nilai *reliability construct* > 0,70. Maka dalam hal ini keberadaan variabel memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

4. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Dalam Pengujian pada model strukturan (*inner model*) bertujuan untuk melihat hubungan antara variable. Pengukuran dilakukan dengan melihat nilai R-Square yang nantinya dapat diketahui tingkat variance terhadap perubahan variable independent terhadap variable dependent. Hasil analisis R-Square ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.28

R-Square

	<i>R-Square</i>
Aksesibilitas Lembaga Keuangan	0,939

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan Tabel diatas yang memperlihatkan nilai *R-Square* pada variable Aksesibilitas Lembaga Keuangan sebesar 0,939. Maka dapat dijelaskan bahwa varian pada variabel Pendapatan, Pendidikan, dan Informasi mampu menjelaskan variabel Aksesibilitas sebesar 0,939 atau sebesar 93,0%.

Pengujian Hipotesis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SEM-PLS dalam uji hipotesis, maka dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.29
Uji Hipotesis

	<i>Original Sampel</i>	<i>T-Statistic</i>	<i>P Values</i>	Keputusan
X1-Y	0,072	0,638	0,523	H0-diterima
X2-Y	0,489	1.072	0,284	H0-diterima
X3-Y	0,082	1.880	0,060	H0-ditolak

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Tabel 4.29 dapat dijelaskan bahwa ketentuan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai original sample sebagai nilai coefficient atau disebut juga nilai beta. Dalam menetapkan penerimaan atau penolakan pada H0 dalam pengujian hipotesis, dapat dilihat dari nilai pada kolom T Statistic dan nilai pada kolom P Values. Adapun ketentuannya adalah jika nilai t statistic lebih besar dari nilai t table ($t \text{ statistic} > t \text{ tabel}$) pada taraf signifikansi 10% (t table dilihat dari jumlah sampel, dimana sampel pada penelitian ini berjumlah 35 responden) atau menggunakan nilai P Value dengan ketentuan jika $< 0,10$, dimana kesimpulannya tolak H0, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan, begitu juga sebaliknya. Hasil analisis data :

1. Pengaruh Faktor Pendapatan terhadap Aksesibilitas Lembaga Keuangan (X1 → Y)

Hasil uji hipotesis Faktor Pendapatan memiliki pengaruh terhadap pengguna Aksesibilitas Lembaga keuangan berdasarkan tabel 4.31 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 0,638, sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 0,10% diperoleh sebesar 1,696 berdasarkan jumlah sampel sebesar 35 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa $t \text{ statistic} < t \text{ tabel}$ ($0,638 < 1,696$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan P Value, dengan ketentuan $p < 0.10$, berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai $0,523 > 0.10$.

Ketentuannya terima H_0 , maka disimpulkan bahwa Faktor Pendapatan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Aksesibilitas Lembaga Keuangan. Karena faktor pendapatan masyarakat sekitar yang hanya mencukupi kebutuhan pokok membuat masyarakat enggan terakses dalam lembaga keuangan.

2. Pengaruh Faktor Pendidikan terhadap Aksesibilitas Lembaga Keuangan ($X_2 \rightarrow Y$)

Hasil uji hipotesis Pendidikan memiliki pengaruh terhadap Aksesibilitas Lembaga Keuangan berdasarkan tabel 4.31 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 1.072, sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 10% diperoleh sebesar 1,696 berdasarkan jumlah sampel sebesar 35 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa t statistic $<$ t tabel ($1.072 < 1.696$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan P Value, dengan ketentuan $p < 0.1$, berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai $0.284 > 0.10$.

Ketentuannya terima H_0 , maka disimpulkan Faktor Pendidikan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Aksesibilitas Lembaga Keuangan. Karena faktor kurang nya pendidikan dan sulitnya akses terhadap pendidikan yang membuat minimnya pengetahuan terhadap aksesibilitas lembaga keuangan.

3. Pengaruh Faktor Informasi terhadap Aksesibilitas Lembaga keuangan ($X_3 \rightarrow Y$)

Hasil uji hipotesis Faktor Informasi memiliki pengaruh terhadap Aksesibilitas Lembaga Keuangan berdasarkan tabel 4.23 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 1.880 sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 10% diperoleh sebesar 1.696 berdasarkan jumlah sampel sebesar 35 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa t statistic $>$ t tabel ($1,880 > 1.696$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan P Value, dengan ketentuan $p < 0.1$, berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai $0.060 < 0.10$.

Ketentuannya tolak H_0 , maka disimpulkan Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Aksesibilitas Lembaga Keuangan. Karena semakin pesatnya perkembangan teknologi sehingga mempermudah dalam mengakses informasi tentang aksesibilitas lembaga keuangan, hal itu lah yang menjadi dampak positif terhadap aksesibilitas lembaga keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Literasi dan Inklusi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK dengan survei nasional yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali, bermula dari tahun 2013, 2016, dan yang paling baru 2019, yang kemungkinan akan dilakukan kembali pada tahun 2022. Survei nasional ini memberikan gambaran mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Secara umum, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, artinya terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang well literate dari tahun ke tahun. Well literate merupakan kondisi dimana seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan layanan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan, sikap, dan perilaku yang benar dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
2. Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia di tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 38,03% yang berarti dari setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 38 orang yang well literate. Hasil ini menunjukkan peningkatan dari survei sebelumnya yakni 29,7% di tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi pada inklusi keuangan yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2019

sebesar 76,19% sedangkan pada tahun 2016 hanya memperoleh sebesar 67,80%. Meskipun menunjukkan peningkatan, di sisi lain data ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki pengetahuan, keyakinan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang benar tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan jasa keuangan formal.

3. Faktor pendapatan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap aksesibilitas lembaga keuangan.
4. Faktor pendidikan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Aksesibilitas Lembaga Keuangan.
5. Faktor informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Aksesibilitas Lembaga Keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, adapun saran sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan yang berperan sebagai lembaga yang menjalankan tugas dalam mengembangkan Literasi dan Inklusi Keuangan lebih terus mensosialisasikan dengan berbagai macam cara yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam mengenai jasa-jasa keuangan dan betapa pentingnya menggunakan jasa keuangan yang ada pada saat ini, karena melihat di lapangan masih banyak masyarakat yang belum melek akan hal itu terutama pada desa pesisir dan desa pedalaman lainnya. Dengan pahamiannya mereka akan hal itu, mereka akan bisa

mengelola dan memanfaatkan keuangan dengan baik supaya usahanya semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliminsyah, Padji, (2006). Kamus istilah keuangan dan Perbankan, Bandung : CV. Rama Widya
- Badan Pusat Statistik, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan tahun 2017-2019, (<https://www.bps.go.id>)
- Badan Pusat Statistik, STATISTIK DAERAH KABUPATEN LANGKAT (2022). (<https://www.bps.go.id>)
- Engel, F.J, Roger, D. B, & Paul, W.M, (2004). Perilaku Konsumen, Jakarta: Binarupa Aksara
- Ghozali, imam, Hengky Latan, (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan smart-PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*, Semarang: BP UNDIP
- Mangani, (2019). Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Erlangga
- Kasmir, Dr., (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers
- Kotler, P., Amstrong, G, (2008). Prinsip – Prinsip Pemasaran (edisi 12).
- Li Enisa Purba, (2021). Analisis Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Tabungan di Indonesia. Skripsi, Universitas Sumatera Utara
- Nasution Anzira Witi, Marlya, (2019). Analisa Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7, No.1, Hal. 40 – 63
- Nurhasanah Mia, (2021). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Sangkanaya Mbet Kabupaten Purbalingga. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- Mankiw,N. Gregory, (2009). *Macroeconomics*, New York: Harvard University
- Otoritas Jasa Keuangan, “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021, (<https://www.ojk.go.id>)
- Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2019). (<https://www.ojk.go.id>)
- Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun (2016). (<https://www.ojk.go.id>)
- Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L, (2012). Makroekonomi (edisi kedelapan), Jakarta: Erlangga
- Rahardja, P., Manurung, M., (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi (Edisi Ketiga), Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahardjo, B., (2009). Laporan Keuangan Perusahaan (Edisi Kedua), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sari, Handriyani, (2018). PROSPEK *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DI SUMATERA UTARA DILIHAT DARI SISI LITERASI KEUANGAN, INKLUSI KEUANGAN DAN KEMISKINAN. Jurnal Akuntansi, Vol. 19, N0.1
- Siti Dara Ruhana, Mariah, (2020). Peran *Fintech* Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat di Jakarta. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2, No.3, Hal. 127 – 138
- Wardhono Aditya, (2019). Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia, Jawa Timur: CV Pustaka Abadi

LAMPIRAN

KUESIONER

ANALISIS PERSEPSI LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT DESA PESISIR DI KECAMATAN BRANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT

Hari / Tanggal :		
Surveyor		
I. Data Pribadi		
Nama		
Alamat		
Jenis Kelamin	A) Laki-Laki B) Perempuan	
Pendidikan Terakhir	A) SD/ Tidak sekolah B) SMP C) SMA/SMK D) DIPLOMA E) S1	
Usia	A) 25 – 35 Tahun	B) 36 – 50 Tahun
Status Pekerjaan	A) PNS/BUMN B) Wiraswasta C) Nelayan D) Ibu rumah tangga E) Lainnya, (Sebutkan)	
Pendapatan	A) < Rp. 1.500.000	B) Rp. 1.500.000 – Rp. 3.000.000
	C) Rp. 3.000.000 – Rp. 6.000.000	D) > 6.000.000

II. PERTANYAAN LITERASI LEMBAGA KEUANGAN

- Apakah anda mengetahui produk/ jasa lembaga keuangan?
 - Mengetahui
 - Tidak Mengetahui
- Jika tahu, maka apa saja produk/jasa lembaga keuangan yang anda ketahui?
 - Simpanan
 - Investasi
 - Pinjaman
 - Asuransi
 - Lainnya (sebutkan)
- Apakah anda mengetahui cara menggunakan/ memanfaatkan produk yang di hasilkan lembaga keuangan?
 - Mengetahui
 - Tidak Mengetahui
- Apa saja produk keuangan yang anda ketahui?

Simpanan		Pinjaman	
	Tabungan		Kredit tanpa jaminan

	Deposito		Kredit kepemilikan rumah
	Simpanan pelajar		Kartu kredit
	Laku Pandai		Kredit usaha
	Lainnya (sebutkan)		Lainnya (sebutkan)

5. Apakah anda menggunakan salah satu produk/ jasa lembaga keuangan?
 - A. Ya
 - B. Tidak
6. Jika iya, produk/ jasa lembaga keuangan seperti apa yang digunakan?
 - A. Simpanan
 - B. Investasi
 - C. Pinjaman
 - D. Asuransi
 - E. Lainnya (sebutkan)
7. Jenis lembaga keuangan seperti apa yang anda gunakan?
 - A. Perbankan
 - B. Non Perbankan
8. Lembaga layanan jasa perbankan/ non perbankan apa yang sering anda gunakan?

Perbankan		Non Perbankan	
	Bank BRI		Pegadaian
	Bank Mandiri		Perusahaan asuransi
	Bank BNI		Koprasi simpan pinjam
	Bank BCA		Perusahaan sewa guna usaha
	Lainnya (sebutkan)		Lainnya (sebutkan)

9. Produk layanan jasa non perbankan apa yang sering digunakan?
 - A. PNM (Mekaar)
 - B. Pinjaman Online
 - C. Koprasi Konsumsi
 - D. Modal Ventura
 - E. BUMDES Simpan Pijam
10. Apakah anda mengetahui tentang keuangan digital?
 - A. Ya
 - B. Tidak
11. Produk layanan keuangan digital seperti apa yang anda ketahui/ gunakan?
 - A. Uang elektronik / E-Money
 - B. Rekening Ponsel
 - C. Tabungan Digital

- D. Laku Pandai
 - E. P2P Lending (Peer To Peer Lending)
12. Jenis keuangan digital seperti apa yang anda gunakan?
- A. Mobile Banking
 - B. OVO
 - C. DANA
 - D. i.saku
 - E. Lainnya (sebutkan)

III. PERTANYAAN KHUSUS

Petunjuk Pengisian :

Isilah jawaban sesuai pendapat anda dengan berikan tingkat penilaian dengan checklist (√) pada kolom yang tersedia.

Jawaban yang tersedia berupa skala likert, yaitu antara 1-5 yang mempunyai arti :

1 = Sangat Tidak Benar/ Setuju/ Mudah/ Sesuai/ Pernah

2 = Tidak Benar/Kurang Setuju/Tidak Mudah/ Tidak Sesuai/Tidak Pernah

3 = Netral/ Cukup

4 = Benar/ Setuju/ Mudah/ Sesuai/ Pernah

5 = Sangat Benar/ Sangat Setuju/ Sangat Mudah/ Sangat Sesuai/ Sangat Pernah

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

PERTANYAAN

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan yang rendah tidak perlu menggunakan jasa lembaga keuangan.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Saya menyisihkan sebagian pendapatan saya untuk tabungan dimasa yang akan datang.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Pendapatan hanya mencukupi kebutuhan.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Jika pendapatan tidak mencukupi, saya lebih memilih meminjam ke lembaga keuangan di bandingkan pinjaman kepada teman atau saudara. Saya mampu mengelola keuangan dengan baik tanpa menggunakan fasilitas keuangan.

1 2 3 4 5

5. Pendapatan yang saya dapat sudah sesuai dengan jenis pekerjaan.

1 2 3 4 5

6. Saya mampu mengelola keuangan dengan baik tanpa menggunakan fasilitas keuangan.

1 2 3 4 5

B. PENDIDIKAN

1. Rendahnya pendidikan mengakibatkan kurangnya pengetahuan terhadap lembaga keuangan.

1 2 3 4 5

2. Pengguna fasilitas keuangan adalah masyarakat berpendidikan tinggi.

1 2 3 4 5

3. Pendidikan lingkungan sekitar dan keluarga berpengaruh terhadap pengetahuan keuangan dalam kehidupan sehari-hari.

1 2 3 4 5

4. Pendidikan mempengaruhi status pekerjaan saya.

1 2 3 4 5



5. Saya mengetahui lembaga keuangan dari pendidikan formal.

1 2 3 4 5

6. Peran pemerintah daerah dalam hal sosialisasi, mempermudah saya untuk mendapatkan informasi jasa keuangan.

1 2 3 4 5

C. INFORMASI

1. Saya mudah mendapatkan informasi mengenai fasilitas lembaga keuangan.

1 2 3 4 5

1. Saya mudah mendapatkan informasi mengenai fasilitas lembaga keuangan.

1 2 3 4 5

2. Saya suka menggunakan mobile banking/ OVO/Dana untuk transaksi sehari-hari

1 2 3 4 5

3. Saya lebih memilih menyimpan uang di Bank dari pada di rumah karena lebih aman dan terjaga.

1 2 3 4 5

4. Saya menggunakan produk jasa keuangan untuk melakukan suatu pembayaran.

1 2 3 4 5

5. Saya mudah mendapatkan informasi mengenai fasilitas lembaga keuangan.

1 2 3 4 5

6. Saya menggunakan jasa pinjaman non perbankan untuk menjalankan usaha saya.

1 2 3 4 5

D. AKSESIBILITAS LEMBAGA KEUANGAN

1. Pesatnya perkembangan digital mempermudah masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan.

1 2 3 4 5

2. Lembaga keuangan yang jauh dari tempat tinggal membuat masyarakat enggan menggunakan produk keuangan.

1 2 3 4 5

3. Akses terhadap lembaga keuangan sangat mudah di jangkau.

1 2 3 4 5

4. Dengan mengetahui produk/jasa keuangan mempermudah saya dalam mengakses layanan tersebut.

1 2 3 4 5

5. Kemudahan dalam mengakses keuangan secara online membuat saya senang menggunakan produk/jasa lembaga keuangan.

1 2 3 4 5

6. Saya menggunakan produk jasa keuangan untuk melakukan suatu pembayaran.

1 2 3 4 5

Jawaban Variabel Pendapatan

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6
1	4	3	3	3	4	4
2	2	3	3	3	4	4
3	3	3	4	4	5	5
4	5	5	3	5	5	5
5	3	3	4	4	4	4
6	4	4	2	4	4	4
7	3	3	3	3	4	4
8	5	5	5	5	4	4
9	2	3	4	4	4	4
10	3	3	3	2	4	4
11	4	3	4	3	4	4
12	4	3	3	4	4	4
13	3	3	2	3	3	3
14	2	3	3	2	3	3
15	3	4	4	4	4	4
16	2	2	2	3	4	4
17	3	3	2	2	2	2
18	4	2	2	4	2	2
19	3	2	2	4	3	3
20	3	3	3	4	4	4
21	2	3	4	4	4	4
22	2	4	4	4	5	5
23	5	5	4	5	4	4
24	3	5	4	3	4	4
25	5	5	5	5	5	4
26	3	3	3	3	3	4
27	4	3	4	3	3	4
28	4	5	5	5	5	5
29	4	4	4	4	4	4
30	2	2	3	4	4	3
31	4	4	3	4	4	3
32	3	4	4	4	3	3
33	4	3	3	4	4	4
34	3	4	4	3	4	4
35	4	4	3	3	4	4

Jawaban Variabel Pendidikan

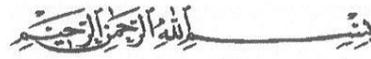
No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
1	3	2	3	3	4	4
2	4	4	4	4	5	5
3	5	5	2	4	4	5
4	4	5	4	5	4	5
5	4	4	3	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4
7	3	3	3	3	3	3
8	5	4	5	4	4	4
9	5	5	5	5	4	5
10	3	3	2	2	2	2
11	4	4	4	4	2	4
12	4	3	3	4	4	4
13	3	3	3	4	2	3
14	2	2	2	3	3	2
15	4	4	5	4	4	4
16	4	5	3	4	4	3
17	2	2	2	3	3	3
18	4	4	4	4	2	4
19	3	3	2	3	3	4
20	4	4	4	4	4	4
21	4	4	2	4	4	4
22	5	2	4	4	4	4
23	4	2	2	4	4	4
24	2	2	3	4	4	5
25	5	5	5	5	5	4
26	4	2	4	4	4	4
27	4	4	4	3	3	4
28	5	5	5	4	5	5
29	4	4	4	4	4	4
30	3	4	4	3	5	3
31	3	4	2	3	3	3
32	3	3	3	3	3	3
33	5	5	4	4	4	5
34	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4

Jawaban Variabel Informasi

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6
1	3	3	4	4	4	3
2	4	4	2	5	5	4
3	5	4	3	4	5	5
4	4	5	5	4	5	4
5	4	5	3	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4
7	3	3	3	3	3	3
8	5	5	5	4	4	5
9	5	5	2	4	5	5
10	3	3	3	2	2	3
11	4	4	4	2	4	4
12	4	3	4	4	4	4
13	3	3	3	2	3	3
14	2	2	2	3	2	2
15	4	4	3	4	4	4
16	4	5	2	4	3	4
17	2	3	3	3	3	2
18	4	4	4	2	4	4
19	3	3	3	3	4	3
20	4	4	3	4	4	4
21	4	4	2	4	4	4
22	5	3	2	4	4	5
23	4	4	5	4	4	4
24	2	3	3	4	5	2
25	5	5	5	5	5	4
26	5	3	4	4	4	3
27	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	5	5	4
29	4	4	4	4	2	4
30	5	4	3	5	3	5
31	4	4	3	3	3	5
32	4	4	3	3	3	1
33	5	4	5	4	5	5
34	5	5	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	3

Jawaban Variabel Aksesibilitas Lembaga Keuangan

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6
1	5	3	3	3	3	4
2	5	4	4	4	4	5
3	3	4	4	4	4	4
4	2	5	5	5	5	4
5	4	5	5	4	4	4
6	1	4	4	4	4	4
7	5	3	3	3	3	3
8	1	4	5	5	4	4
9	3	5	5	5	5	4
10	3	3	3	3	2	2
11	5	4	4	4	4	2
12	2	4	3	4	4	4
13	3	3	3	2	4	2
14	3	2	2	3	3	3
15	5	5	4	4	4	4
16	4	2	5	4	4	4
17	4	3	3	3	3	3
18	5	4	4	4	4	2
19	5	3	3	3	3	3
20	5	4	4	4	4	4
21	5	4	4	4	4	4
22	4	3	3	3	4	4
23	3	4	4	4	4	4
24	5	4	3	4	4	4
25	5	5	5	5	5	5
26	5	5	4	4	4	4
27	4	4	3	3	4	4
28	5	4	5	5	4	5
29	4	5	4	4	4	4
30	4	5	3	4	3	5
31	4	4	3	2	3	3
32	4	4	3	3	3	3
33	3	4	4	4	4	5
34	2	5	5	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ALFIRA ISRAFIA
 NPM : 1805180007
 Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
 Alamat : JL. SIDORUKUN NO.39
 Judul Skripsi : ANALISIS PERSEPSI LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT DESA PESISIR DI KECAMATAN BRANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
10-08-2022	- Perbaiki dan perbahasakan kembali yg ada - Tampilkan hasil kuisioner ttg identitas responden - Bertajam lagi analisisnya.	} h	
16-08-2022	- Buat abstraknya - Buat dft tabel dan dft gambar - hampirkan kuisionernya	} h	
23-08-2022	- Perbahasakan lagi penulisan daftar pustaka dan bab keenam kerangka.	} h	
31-08-2022	Teluh selesai diujikan dan sepuji untuk ridang skripsi.	} h	

Pembimbing Skripsi

Dra. LAILAN SAFINA HSB, M.Si.

Medan, September 2022
 Diketahui / Disetujui
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini 21 Juni 2022 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan perangkan bahwa :

N a m a : Alfira Israfia
N .P.M. : 1805180007
Tempat / Tgl.Lahir : P. Brandan, 25 Oktober 2000
Alamat Rumah : Jalan Sidorukun No.39 G Medan
JudulProposal : Analisis Persepsi Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Masyarakat Desa Pesisir Di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I <i>jumlah mslh di pahami agar tujuan lebih akurat.</i>
Bab II
Bab III <i>sebaiknya tujuan Pesisir.</i>
Lainnya
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 21 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Pembimbing

Dra. Lailan Safina Hasibuan, SE, M.Si

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembanding

Dr. Prawidya Hairani RS., SE., M. Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **Selasa 21 Juni 2022** menerangkan bahwa:

Nama : Alfira Israfia
N .P.M. : 1805180007
Tempat / Tgl.Lahir : P. Brandan, 25 Oktober 2000
Alamat Rumah : Jalan Sidorukun No.39 G Medan
JudulProposal : Analisis Persepsi Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Masyarakat Desa Pesisir Di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : **Dra. Lailan Safina Hasibuan, SE, M.Si**

Medan, 21 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dra. Lailan Safina Hasibuan, SE, M.Si Si

Pembanding

Dr. Prawidya Hairani RS., SE., M.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I

Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1999/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/10/1/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 10/1/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Alfira Israfia
NPM : 1805180007
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : ① Minimnya akses jasa keuangan di desa menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Aksesibilitas keuangan
2. Apakah masyarakat desa sudah mengetahui sistem pembayaran non bank

Rencana Judul : ① Analisis Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Pengetahuan Aksesibilitas Keuangan (Studi Kasus : Desa Pesisir Kabupaten Langkat Kecamatan Berandan Barat)
2. Analisis Pengaruh Transaksi Nontunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
3. Analisis Pengaruh Jumlah Industri, Jumlah Penduduk Dan Nilai Investasi Terhadap Kesempatan Kerja

Objek/Lokasi Penelitian : Desa Pesisir (Perlis Dan Kelantan) Kabupaten Langkat, Kecamatan Berandan Barat

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Alfira Israfia)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1999/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/10/1/2022

Nama Mahasiswa : Alfira Israfa
NPM : 1805180007
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset
Tanggal Pengajuan Judul : 10/1/2022
Nama Dosen Pembimbing¹⁾ :
Dra. Laelan Saefna Hsb. M.Si
Judul Disetujui²⁾ : Analisis Persepsi Masyarakat Desa Terhadap
pengetahuan Aksesibilitas Keuangan (studi kasus:
Desa perisir Kabupaten Langkat Kecamatan
Brandan Barat)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Pratiya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, 20 Januari 2022.

Dosen Pembimbing

(Dra. Laelan Saefna Hsb. M.Si.)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah diisikan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.

Halaman ke 2 dari 2 halaman